

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka diperoleh kesimpulan bahwa baik Jurnal Nasional dan Kompas tidak menyajikan pemberitaan yang objektif mengenai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Hasil dari 11 unit analisis yang diteliti, menunjukkan bahwa hanya satu unit analisis memenuhi syarat objektivitas yaitu pada aspek akurasi, sedangkan 10 unit analisis lainnya tidak memenuhi syarat objektivitas berita. Berita-berita yang disajikan Jurnal Nasional dan Kompas, ditinjau dari aspek ini seluruhnya memenuhi syarat akurasi yakni adanya *check and recheck*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan Jurnal Nasional dan Kompas dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya pencantuman nama narasumber, jabatan, tempat kejadian, dan waktu peristiwa.

Dilihat dari hasil analisis, Jurnal Nasional dan Kompas masih banyak menggunakan kata-kata yang memuat unsur sensasionalisme. Hal tersebut dilihat dari presentase kategori adanya dramatisasi pada Jurnal Nasional sebesar 44,7%, sedangkan Harian Kompas sebesar 43,3%. Sensasionalisme tidak dapat dibenarkan dalam ranah jurnalistik yang menekankan objektivitas pemberitaan (Rahayu, 2006:24).

Jika dilihat dari aspek *even handed evaluation*, pemberitaan Jurnal Nasional yang memuat unsur positif cukup banyak yakni sebesar 63,2%,

sedangkan berita dengan unsur negatif hanya sebesar 7,9%, dan 28,9% sisanya memuat pemberitaan yang netral. Banyaknya berita yang positif ini semakin menguatkan bahwa Jurnal Nasional mempunyai afiliasi politik dengan Partai Demokrat. Dilihat dari sejarahnya (Lihat Bab II), sejak awal berdirinya, Jurnal Nasional merupakan media yang pro terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari uraian tersebut, Jurnal Nasional dapat dikatakan tidak objektif karena terkesan memihak pada salah satu kubu sehingga berita yang disajikan tidak netral.

Merujuk pada hasil penelitian, Nurudin dalam artikelnya yang berjudul *Media Massa dan Tantangan Objektivitas* menguraikan bahwa media massa kita tidak akan bisa melepaskan diri dari bahasan fakta dan opini atau fiksi. Westerstahl, pernah meyorokkan bahwa yang dinamakan objektif setidaknya mengandung faktualitas dan imparsialitas. Namun yang dikemukakan oleh Westerstahl tersebut di atas dalam praktiknya tidak mudah untuk diwujudkan (<http://nurudin.staff.umm.ac.id/>).

Jurnal Nasional dan Kompas sebaiknya memperbaiki aspek penyajian berita dengan memperhatikan batasan-batasan antara ranah redaksional dengan kepentingan politik. Begitu pula dengan Kompas, walaupun tidak mempunyai afiliasi politik dengan partai manapun hendaknya berita yang disajikan netral, tidak memihak, dan memenuhi syarat-syarat objektivitas pemberitaan. Bagaimana pun juga, media merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, sehingga berita yang disajikan sebaiknya mengakomodasi kebutuhan

masyarakat. Media juga harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan kontrol sosial.

## **B. SARAN**

Penelitian ini menggunakan teori objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl. Teori objektivitas Westerstahl ini sudah banyak digunakan dalam berbagai penelitian mengenai objektivitas. Unit analisis dan kategorisasi dalam penelitian ini juga sudah banyak digunakan oleh peneliti lain. Untuk penelitian selanjutnya, akan lebih menarik jika menggunakan kode etik jurnalistik dalam menganalisis objektivitas berita. Sehingga diharapkan penelitian tersebut nantinya dapat menambah literatur dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai objektivitas pemberitaan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performances: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publication.
- McQuail, Denis. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rahayu. 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Media & Budaya Populer Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi Informasi.
- Siahaan, Hotman M. 2001. *Pers yang Gamang*. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial.
- Siregar, Ashadi dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sumadiria, Haris AS. 2006. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.

### Skripsi:

- Dasyanti, Anmaria Redi Pinta. 2013. *Jokowi di Mata Surat Kabar Harian Jurnal Nasional (Analisis Framing Jokowi dalam Berita di Surat Kabar Harian Jurnal Nasional Periode 11 Juli sampai dengan 20 September 2012)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mahargyaningtyas, Yudit. 2010. *Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus Bank Century dalam Surat Kabar Harian Umum Jurnal Nasional (Analisis Framing Pemberitaan Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus Bank Century dalam SKH Umum Jurnal Nasional edisi 13 November-1 Desember 2009)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Natalis, Christian. 2013. *Pemberitaan Upaya Palestina Menjadi Anggota PBB (Analisis Isi Kuantitatif Media tentang Objektivitas Pemberitaan Palestina menjadi Anggota PBB pada Surat Kabar Harian Kompas dan Jawa Pos Periode 15 September – 15 November 2011)*. Jurusan Ilmu Komunikasi. UAJY.

Setiawan, Onang. 2011. *Pemberitaan Bakrie, PSSI, dan Persepakbolaan Indonesia di VIVANEWS.COM (Studi Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Aburial Bakrie tentang PSSI di VIVANEWS.COM)*. Jurusan Ilmu Komunikasi. UAJY.

#### **Jurnal:**

Fransiska, Ni Ketut Efrata. *Objektivitas Pemberitaan Peserta Partai Politik Tahun 2009 dalam Periode Kampanye Pemilihan Legislatif Di Koran Nasional*. 2009. *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA Vol.3*.

#### **Artikel:**

Halim, Syaiful. 2012. *Berita Televisi, Konstruksi “Objektivitas” yang Tergesagesa*

#### **Internet**

Akuntono, Indra. 2013. *Demi Nama Baik, Partai Demokrat Desak TVRI Minta Maaf*. Diakses 23 Sept 2013 dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/20/1741039/Demi.Nama.Baik.Partai.Demokrat.Desak.TVRI.Minta.Maaf>

Demokrat. *Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat*. Diakses 10 April 2013 pukul 20.30 dari <http://www.demokrat.or.id/sejarah/>

Kompas. *Sejarah Kompas*. Diakses 13 November 2013 pukul 11.25 dari <http://print.kompas.com/about/sejarahkompas.html>

Kompas Gramedia. *Kompas*. Diakses 1 Mei 2013 pukul 12.10 dari <http://www.kompasgramedia.com/business/newspapers/kompas>,

Kompas Gramedia. *Kompas*. Diakses 13 November 2013 pukul 11.35 dari <http://www.kompasgramedia.com/business/newspapers/kompas>

Kompas Iklan. Diakses 13 November 2013 pukul 11.40 dari <http://www.kompasiklan.com/about>

Partai. *Pemilihan Umum 2009*. Diakses 10 April 2013 pukul 21.30 dari <http://www.partai.info/pemilu2009/index.php>,

Nurudin. 2010. *Media Massa dan Tantangan Objektivitas*. Diakses 10 September pukul 16.04 dari <http://www.nurudin.staff.umm.ac.id/2010/02/16/media-massa-dan-tantangan-objektivitas/>

#### **Surat Kabar:**

Jurnal Nasional. *KLB Demokrat Tempuh Jalur Musyawarah Mufakat*. 22 Maret 2013.

Jurnal Nasional. *DPD RI Dukung SBY*. 27 Maret 2013.

Jurnal Nasional. *Dukungan kepada SBY Menguat*. 30 Maret 2013.

Jurnal Nasional. *KLB Selamatkan Partai Demokrat*. 31 Maret 2013.



# LAMPIRAN

**PEMBERITAAN KONGRES LUAR BIASA PARTAI DEMOKRAT PADA HARIAN  
JURNAL NASIONAL DAN HARIAN KOMPAS**

**(Analisis Isi Kuantitatif Objektivitas Pemberitaan Kongres Luar Biasa Partai  
Demokrat pada Harian Jurnal Nasional dan Harian Kompas Periode 1 Maret – 5 April  
2013)**

Nomor Coder :

Judul Berita :

Tanggal Berita :

**DIMENSI FAKTUALITAS**

1. Fakta yang terkandung dalam berita
  - Fakta sosiologis
  - Fakta psikologis
2. Akurasi berita
  - Ada *check and recheck*
  - Tidak ada *check and recheck*
3. Kelengkapan informasi dalam berita
  - Lengkap
  - Tidak lengkap
4. Arah peliputan berita yang menyangkut nilai berita
  - Mengarah ke *significance*
  - Mengarah ke *Human Interest*

**DIMENSI IMPARSIALITAS**

1. Pencampuran opini dan fakta
  - Ada pencampuran opini dan fakta
  - Tidak ada pencampuran opini dan fakta
2. Isi berita terdapat unsur sensasionalisme
  - Ada dramatisasi
  - Tidak ada dramatisasi
3. Isi berita terdapat unsur *stereotype*
  - Ada
  - Tidak ada
4. Isi berita terdapat unsur *juxtaposition*
  - Ada
  - Tidak ada
5. Isi berita terdapat unsur *linkages*
  - Ada
  - Tidak ada
6. Keberimbangan berita
  - Satu sisi
  - Dua sisi
  - Multi sisi
7. Evaluasi keseluruhan terhadap isi berita dan pihak-pihak yang diberitakan
  - Positif
  - Negatif
  - Netral

### HASIL CODING SURAT KABAR JURNAL NASIONAL

| No | Tanggal       | Judul Artikel   | Fac | Aku rasi | Comp | Relevansi | Non-Eva | Non-Sens | Stereo type | Juxt | Link ages | Eq. Acc | Ev Hand |
|----|---------------|---|-----|----------|------|-----------|---------|----------|-------------|------|-----------|---------|---------|
| 1  | 1 Maret 2013  | Demokrat Butuh Pilot Berkualitas Tinggi                       | A   | A        | A    | A         | A       | A        | B           | A    | A         | B       | C       |
| 2  | 2 Maret 2013  | Segera Tetapkan Ketum Demokrat                                | A   | A        | A    | A         | B       | A        | B           | A    | B         | C       | A       |
| 3  | 3 Maret 2013  | Ketum Demokrat Total Urus Partai                              | A   | A        | A    | A         | B       | A        | B           | A    | A         | C       | A       |
| 4  | 4 Maret 2013  | Demokrat Butuh Figur Bebas Konflik                            | B   | A        | A    | A         | B       | A        | B           | A    | A         | B       | A       |
| 5  | 5 Maret 2013  | Antisipasi Kader Demokrat dari HMI                            | A   | A        | A    | B         | B       | A        | B           | B    | A         | B       | B       |
| 6  | 8 Maret 2013  | Demokrat Terancam Tak Ikut Pemilu                             | B   | A        | A    | B         | B       | A        | B           | B    | A         | B       | B       |
| 7  | 11 Maret 2013 | Demokrat Pastikan Gelar KLB                                   | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | A         | C       | C       |
| 8  | 13 Maret 2013 | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | B   | A        | A    | B         | A       | A        | B           | B    | A         | A       | A       |
| 9  | 14 Maret 2013 | Ketua Umum Partai Demokrat Lebih Baik Kader Partai            | B   | A        | A    | B         | A       | B        | B           | A    | A         | C       | C       |
| 10 | 15 Maret 2013 | Jelang KLB Demokrat Sejumlah Kandidat Bermunculan             | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | A         | B       | B       |
| 11 | 16 Maret 2013 | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | B         | B       | C       |
| 12 | 19 Maret 2013 | Majelis Tinggi Kontrol KLB                                    | A   | A        | A    | A         | B       | B        | A           | B    | A         | C       | A       |
| 13 | 20 Maret 2013 | SBY Kantongi Nama Calon Ketua Umum                            | A   | A        | A    | A         | B       | B        | A           | B    | A         | C       | C       |
| 14 | 22 Maret 2013 | KLB Demokrat Tempuh Jalur                                     | A   | A        | A    | A         | B       | B        | A           | B    | A         | A       | A       |

|    |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |               | Musyawaharah Mufakat                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 26 Maret 2013 | Dukungan SBY Jadi Ketum Demokrat Menguat          | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | C |
| 16 | 27 Maret 2013 | Ketua Umum Demokrat DPD RI Dukung SBY             | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 17 | 27 Maret 2013 | JK: Tidak Salah SBY Jadi Ketua Umum               | B | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 18 | 28 Maret 2013 | Aburizal Bakrie Akui Kualitas SBY                 | B | A | B | B | B | A | B | A | A | A | A |
| 19 | 28 Maret 2013 | Kumpulkan DPD dan DPC Marzuki Alie Kena Semprit   | A | A | A | A | B | A | A | A | B | C | C |
| 20 | 28 Maret 2013 | Usulan SBY Menjadi Ketua Umum Semakin Mengkristal | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A |
| 21 | 28 Maret 2013 | Tujuan KLB Untuk Menyatukan Suara Kader           | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B | A |
| 22 | 30 Maret 2013 | Dukungan Kepada SBY Menguat                       | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A |
| 23 | 30 Maret 2013 | KLB Demokrat Siap Seratus Persen                  | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | A |
| 24 | 30 Maret 2013 | Kena Semprit, Marzuki Alie Mundur Nyalon          | A | A | A | A | B | A | B | A | B | C | C |
| 25 | 30 Maret 2013 | Hari Ini, Anas Resmi Diberhentikan                | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A | C |
| 26 | 31 Maret 2013 | KLB Selamatkan Partai Demokrat                    | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | A |
| 27 | 31 Maret 2013 | DPD dan DPC Minta SBY Jadi Ketua Umum             | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 28 | 31 Maret 2013 | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                     | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A |
| 29 | 31 Maret 2013 | Kader Siap Jalankan Instruksi Ketua Umum          | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 30 | 31 Maret 2013 | SBY Segera Angkat Pengurus Harian                 | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A |
| 31 | 31 Maret 2013 | Ketua Harian Kendalikan                           | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A |

|    |              | TugasPartai   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 April 2013 | SBY Fokus Jalankan Tugas Negara, Syarief Hasan Ketua Harian | A | A | A | A | B | A | B | B | B | A | A |
| 33 | 1 April 2013 | KLB Hasilkan The Dream Team                                 | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | A |
| 34 | 1 April 2013 | Demokrat Wajib Tampilkan Caleg Kredibel                     | B | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C |
| 35 | 1 April 2013 | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C |
| 36 | 3 April 2013 | SBY Bentuk Formatur Pengurus Demokrat                       | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | A |
| 37 | 4 April 2013 | Syarief Hasan Bantah PD Partai Dinasti                      | A | A | A | A | B | A | B | B | A | B | A |
| 38 | 5 April 2013 | Pekan Depan Demokrat Umumkan Waketum Tambahan               | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |

### HASIL CODING SURAT KABAR KOMPAS

| No | Tanggal       | Judul Artikel                          | Fac | Aku rasi | Comp | Relevansi | Non-Eva | Non-Sens | Stereo type | Juxt | Link ages | Eq. Acce ss | Ev Hand |
|----|---------------|--|-----|----------|------|-----------|---------|----------|-------------|------|-----------|-------------|---------|
| 1  | 1 Maret 2013  | Diragukan, Anas Berani                 | A   | A        | A    | A         | A       | A        | B           | B    | A         | C           | C       |
| 2  | 2 Maret 2013  | Pemilihan Ketua Baru Demokratis        | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | B         | C           | C       |
| 3  | 3 Maret 2013  | Demokrat Mengharap Dispensasi dari KPU | A   | A        | A    | A         | B       | A        | B           | A    | A         | C           | C       |
| 4  | 3 Maret 2013  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput    | B   | A        | A    | B         | B       | A        | A           | A    | A         | C           | C       |
| 5  | 5 Maret 2013  | Pengurus Baru Harus Terdaftar          | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | A    | B         | C           | C       |
| 6  | 6 Maret 2013  | Partai Demokrat Yakinkan Solid         | A   | A        | B    | A         | A       | A        | A           | B    | B         | C           | B       |
| 7  | 7 Maret 2013  | SBY Harus Berkompromi                  | A   | A        | A    | A         | A       | A        | B           | B    | B         | B           | C       |
| 8  | 9 Maret 2013  | Pelaksana Tugas Pekan Depan            | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | A         | A           | A       |
| 9  | 11 Maret 2013 | SBY Minta Disiapkan Kongres Luar Biasa | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | A    | A         | A           | A       |
| 10 | 13 Maret 2013 | Anas Siapkan Pertarungan               | A   | A        | A    | A         | A       | A        | A           | B    | A         | B           | A       |
| 11 | 14 Maret 2013 | Ketua Umum Fokus Urus Partai           | B   | A        | A    | A         | A       | B        | B           | B    | B         | C           | C       |
| 12 | 15 Maret 2013 | Syarat Pas Untuk Ny Ani                | A   | A        | A    | A         | B       | A        | A           | B    | B         | B           | C       |
| 13 | 16 Maret 2013 | Ny Ani dan Ibas Tidak Akan Maju        | A   | A        | A    | A         | B       | A        | A           | B    | B         | C           | C       |
| 14 | 18 Maret 2013 | Bali Siap Jadi Tuan Rumah KLB Demokrat | A   | A        | B    | A         | B       | B        | B           | B    | A         | A           | A       |
| 15 | 19 Maret 2013 | Kongres Bakal Diarahkan                | A   | A        | A    | A         | A       | A        | A           | A    | A         | B           | C       |
| 16 | 20 Maret 2013 | Bingung Mencari Ketua Umum             | A   | A        | A    | A         | A       | B        | B           | B    | A         | B           | B       |
| 17 | 21 Maret 2013 | Majelis Tinggi Ikat DPD - DPC          | A   | A        | B    | A         | B       | A        | B           | B    | B         | B           | C       |
| 18 | 22 Maret 2013 | Calon Dipastikan Kader                 | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | A         | A           | A       |
| 19 | 25 Maret 2013 | Daerah Ingin SBY Ketua Umum            | A   | A        | A    | A         | B       | A        | B           | B    | A         | B           | C       |
| 20 | 26 Maret 2013 | KLB Demokrat SBY Pertimbangkan         | A   | A        | A    | A         | B       | B        | B           | B    | B         | C           | C       |

|    |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |               | Usul Pengurus Daerah                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 27 Maret 2013 | Kaderisasi Bisa Mandek                    | A | A | A | A | B | B | B | A | A | C | B |
| 22 | 28 Maret 2013 | Marzuki Alie Ditegur SBY                  | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B |
| 23 | 30 Maret 2013 | SBY Tidak Mau Terganggu                   | A | A | A | A | B | B | A | B | A | B | A |
| 24 | 31 Maret 2013 | SBY: Jangan Tergantung Figur              | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | A |
| 25 | 1 April 2013  | Yudhoyono Tidak Konsisten                 | B | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B |
| 26 | 1 April 2013  | Kepengurusan Sebatas Solusi Jangka Pendek | A | A | A | B | B | A | B | B | A | B | A |
| 27 | 2 April 2013  | Menteri Kian Leluasa                      | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | B |
| 28 | 3 April 2013  | Partai Demokrat, Kepengurusan Membengkak  | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | B |
| 29 | 3 April 2013  | Menteri Parpol Janji Bagi Waktu           | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A |
| 30 | 4 April 2013  | Rangkap Jabatan Langgar Etika             | B | A | A | A | B | B | B | A | B | A | B |

## HASIL UJI RELIABILITAS

### 1. *Factualness*

Tabel 1

Hasil Uji Reliabilitas *Factualness*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | B        | B       | B       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | A       | B       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | A       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B        | B       | B       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | B        | B       | B       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | B        | A       | B       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek  | A        | A       | B       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A        | A       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | B        | A       | B       |

Sumber: coding sheet

A= Fakta Sosiologis

B= Fakta Psikologis

a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(9)}{10 + 10} = 0,9$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,7+0,9}{2} = 0,8$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu pada sub unit analisis *factualness*, sebesar 0,7 atau 70%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara

peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,9 atau 90%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,8 atau 80%. Menurut formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 2. Akurasi (*Accuracy*)

Tabel 2  
Hasil Uji Reliabilitas Akurasi (*Accuracy*)

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | A       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | A        | A       | A       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | A       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | A        | A       | A       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | A        | A       | A       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | A        | A       | A       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek  | A        | A       | A       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A        | A       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | A        | A       | A       |

Sumber: coding sheet

A= Ada *check* dan *recheck*

B= Tidak ada *check* dan *recheck*

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(10)}{10 + 10} = 1$$

- b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(10)}{10 + 10} = 1$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{1+1}{2} = 1$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu pada sub unit analisis akurasi, sebesar 1 atau 100%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 1 atau 100%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 1 atau 100%. Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi dalam formula Holsti adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

### 3. Kelengkapan (*Completeness*)

Tabel 3  
Hasil Uji Reliabilitas Kelengkapan (*Completeness*)

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | A       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | A        | A       | A       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | B       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | A        | A       | A       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | A        | A       | A       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | A        | A       | A       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek  | A        | A       | A       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A        | A       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | A        | A       | A       |

Sumber: coding sheet

A= Lengkap

B= Tidak Lengkap

#### a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(10)}{10 + 10} = 1$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(9)}{10 + 10} = 0,9$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{1+0,9}{2} = 0,95$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis kelengkapan, sebesar 1 atau 100%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,9 atau 90%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,95 atau 95%. Jika merujuk pada formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

4. **Relevansi** (*relevance*)

Tabel 4

Hasil Uji Reliabilitas Relevansi (*Relevance*)

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | B        | A       | B       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | A        | A       | A       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | B       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | A        | A       | B       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | B        | A       | B       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | A        | A       | A       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandeg  | A        | A       | A       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A        | A       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | A        | A       | A       |

Sumber: coding sheet

A= Mengarah ke *significance*

B= Mengarah ke *Human Interest*

a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(8)}{10 + 10} = 0,8$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,8+0,7}{2} = 0,75$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam unit analisis relevansi, sebesar 0,8 atau 80%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,75 atau 75%. Menurut formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 5. *Non-evaluative*

Tabel 5

Hasil Uji Reliabilitas *Non-evaluative*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | A       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | B       | B       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | B       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | B        | B       | B       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B        | B       | B       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | B        | B       | B       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | A        | B       | B       |

|    |                           |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandeg    | B | B | B |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu   | B | B | A |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten | A | B | B |

Sumber: coding sheet

A= Ada pencampuran opini dan fakta, B= Tidak ada pencampuran opini dan fakta

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

- b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,8+0,8}{2} = 0,7$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *non-evaluative*, sebesar 0,7 atau 70%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,7 atau 70%. Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi dalam formula Holsti adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 6. *Non-Sensational*

Tabel 6

Hasil Uji Reliabilitas *Non-sensational*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | B       | B       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | B       | B       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | B        | B       | B       |

|    |                                     |   |   |   |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat        | B | B | B |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput | A | B | A |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai        | B | B | A |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek              | B | B | B |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu             | B | B | B |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten           | B | B | A |

Sumber: coding sheet

A= Ada dramatisasi

B= Tidak ada dramatisasi

a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(8)}{10 + 10} = 0,8$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,8+0,7}{2} = 0,75$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *non-sensational*, sebesar 0,8 atau 80%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,75 atau 75%. Jika merujuk pada formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 7. *Stereotype*

Tabel 7  
Hasil Uji Reliabilitas *Stereotype*

| No | Judul Berita                                | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014 | B        | B       | A       |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B | B | B |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | B | B | B |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | B | B | B |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B | B | A |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | A | A | A |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | B | B | B |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek  | B | B | B |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A | A | A |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | B | B | A |

Sumber: coding sheet

A= Ada

B= Tidak ada

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(10)}{10 + 10} = 1$$

- b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{1+0,7}{2} = 0,85$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *stereotype*, sebesar 1 atau 100%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,85 atau 85%. Jika merujuk pada formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 8. *Juxtaposition*

Tabel 8

Hasil Uji Reliabilitas *Juxtaposition*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | B        | B       | B       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | B       | A       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | B        | B       | B       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | B        | B       | B       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B        | B       | A       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | A        | A       | A       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | B        | A       | B       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandeg  | A        | A       | A       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | B        | B       | B       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | B        | B       | B       |

Sumber: coding sheet

A= Ada

B= Tidak ada

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(9)}{10 + 10} = 0,9$$

- b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(8)}{10 + 10} = 0,8$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,8+0,8}{2} = 0,8$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *juxtaposition*, sebesar 0,8 atau 80%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,8 atau 80%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,8 atau 80%. Menurut formula Holsti, angka reliabilitas

minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

## 9. *Linkages*

Tabel 9  
Hasil Uji Reliabilitas *Linkages*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | B       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | B       | B       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | B        | B       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | A       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B        | B       | B       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | A        | B       | A       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | B        | B       | B       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandek  | A        | A       | A       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | A        | B       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | B        | B       | A       |

Sumber: coding sheet

A= Ada                      B= Tidak ada

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

- b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(8)}{10 + 10} = 0,8$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *linkages*, sebesar 0,7 atau 70%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,8 atau 80%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,75 atau 75%. Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi dalam formula Holsti adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

#### 10. *Equal access*

Tabel 10

Hasil Uji Reliabilitas *Equal-access*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | A       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | B        | B       | B       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | A       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | B        | B       | B       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | C        | A       | B       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | C        | C       | C       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandeg  | C        | C       | C       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | B        | A       | B       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | A        | A       | C       |

Sumber: coding sheet

A= Satu sisi

B= Dua sisi

C= Multi sisi

- a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(8)}{10 + 10} = 0,8$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,8+0,7}{2} = 0,75$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *equal access*, sebesar 0,8 atau 80%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coefficient Reliability*) sebesar 0,75 atau 75%. Menurut formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga hasil CR tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

11. *Even handed evaluation*

Tabel 11

Hasil Uji Reliabilitas *Even Handed Evaluation*

| No | Judul Berita  | Peneliti | Coder 1 | Coder 2 |
|----|---|----------|---------|---------|
| 1  | Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014                   | A        | A       | A       |
| 2  | Calon Ketua Umum Demokrat Dianggap Lebih Tepat Ditentukan SBY | C        | C       | C       |
| 3  | KLB Selamatkan Partai Demokrat                                | A        | A       | A       |
| 4  | Ibas Ajak Kader untuk Bangkit                                 | A        | A       | A       |
| 5  | SBY Pilihan Terbaik Demokrat                                  | C        | C       | C       |
| 6  | SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput                           | B        | B       | C       |
| 7  | Ketua Umum Fokus Urus Partai                                  | C        | C       | C       |
| 8  | Kaderisasi Bisa Mandeg  | C        | C       | B       |
| 9  | SBY Tidak Mau Terganggu                                       | C        | A       | A       |
| 10 | Yudhoyono Tidak Konsisten                                     | B        | B       | B       |

Sumber: coding sheet

A= Positif

B= Negatif

C= Netral

a. Peneliti dengan Coder I

$$CR = \frac{2(9)}{10 + 10} = 0,9$$

b. Peneliti dengan Coder II

$$CR = \frac{2(7)}{10 + 10} = 0,7$$

$$\text{Rata-rata } CR = \frac{0,9+0,7}{2} = 0,8$$

Hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder satu dalam sub unit analisis *even handed evaluation*, sebesar 0,9 atau 90%. Sedangkan hasil uji reliabilitas antara peneliti dengan pengkoder dua sebesar 0,7 atau 70%. Rata-rata CR (*Coeficient Reliability*) sebesar 0,8 atau 80%. Jika merujuk pada formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, sehingga sudah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan penelitian.

# Demokrat Wajib Tampilkan Caleg Kredibel

Jakarta | Jurnal Nasional

HARAPAN agar elektabilitas Partai Demokrat mengalami peningkatan pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) tampaknya belum tentu bisa terjadi secara otomatis. Harapan tersebut dinilai baru akan terwujud jika partai menampilkan calon anggota legislatif (Caleg) yang benar-benar teruji kredibilitasnya. Hal itu dikatakan pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada *Jurnal Nasional*, Minggu, (31/3).

Margarito mengaku kurang sependapat jika dikatakan elektabilitas Partai Demokrat akan sontak mengalami peningkatan hanya berpatokan pada kinerja kabinet semata. Sudah menjadi rahasia umum, jika para menteri yang berasal dari partai selain Demokrat akan mendahulukan kepentingan kelompoknya dibanding masyarakat banyak. "Dalam kabinet kan masih banyak menteri yang berasal dari partai lain," lanjut Margarito.

Pengamat Politik, Hanta Yuda AR mengatakan bahwa elektabilitas Partai Demokrat sangat bergantung pada hasil kerja kabinet saat ini. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kerja-kerja nyata bagi rakyat sangat dinantikan masyarakat luas sebelum memberikan kembali dukungannya kepada Partai Demokrat. "Apakah elektabilitas partai akan baik? Kinerja kabinet berkolerasi dengan hal tersebut," kata Hanta.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik mengakui bahwa dibutuhkan waktu untuk kembali mendongkrak elektabilitas partai. Meski demikian, Wacik sangat yakin terpilihnya SBY secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai akan memberikan dampak luar biasa terhadap elektabilitas itu sendiri. "Mengenai elektabilitas memang perlu waktu. Kemarin, sudah muncul 11,8 persen. Ini kemungkinan akan naik lagi," kata Wacik. ■ Heri Arland

# Syarief Hasan Bantah PD Partai Dinasti

SEJUMLAH pihak menilai Partai Demokrat (PD) kini telah menjadi partai dinasti. Hal ini dikarenakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini menduduki Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara itu, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang merupakan anak SBY, tetap menduduki posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat.

Terkait tudingan itu, Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan pun angkat bicara. Menurutnya, orang-orang yang berpandangan seperti itu adalah keliru. "Ibas itu terpilih pada Kongres Demokrat tahun 2005, kemudian Kongres Luar Biasa (KLB) itu hanya untuk mengisi ketua umum," ujar Syarief Hasan, di kantornya, di Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (3/4).

Syarief melanjutkan, diselenggarakannya KLB Demokrat dikarenakan Partai Demokrat itu perlu diselamatkan. "Perlu penyelamatan partai, perlu dilakukan konsolidasi. Dan semua kader partai demokrat pada hari itu secara aklamasi meminta agar SBY jadi ketua umum," jelas Syarief Hasan.

Karena itulah, menurut Syarief, tidak ada pengkondi-

sian seperti itu, "SBY pun juga tidak akan mau", tambahnya. Dan pada akhirnya, lanjut Syarief, SBY kemudian mengajukan syarat. "SBY mau jadi ketua umum untuk menyelamatkan partai, tapi beliau tidak mau menjalankan tugas-tugas sehari-hari."

Selain membantah tudingan sejumlah pihak sebagai partai dinasti, Syarief Hasan pun terlihat gregetan manakala ada pihak yang mengatakan KLB di Bali merupakan rekayasa saja. "Bagaimana melakukan rekayasa, pada saat itu, kongres dibuka untuk pers, terbuka dari awal hingga terakhir. Ada sekitar 600 orang yang hadir. Kalau direkayasa, ada yang tidak setuju, kelihatan oleh pers," ujar Syarief. Dia pun mempertegas bahwa KLB adalah bukan rekayasa.

Pada KLB Demokrat yang digelar pada 30-31 Maret lalu, secara aklamasi memilih SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, SBY menyebutkan bahwa KLB adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014. "KLB

tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," ujar SBY, Sabtu (30/3).

Keterpaksaan tersebut, tambah SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya ketua umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Meski, menjabat sebagai ketua umum, SBY mengajukan syarat agar terdapat juga posisi ketua harian sebagai jabatan baru yang ada di struktural Partai Demokrat. Ia mendelegasikan tugas ketua umum kepada Ketua Harian, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Harian ditetapkan untuk membantu SBY melaksanakan tugas partai. Dan yang terpilih saat itu Ketua Harian DPP Demokrat dijabat Syarief Hasan, Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun, Ketua Harian Dewa Pembina dijabat oleh EE Mangindaan. Lembaga ini juga aktif mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pembina.

■ Fifi Asiani

# Usulan SBY Menjadi Ketua Umum Semakin Mengkristal

28 Mar

Jakarta | Jurnal Nasional

USULAN agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum semakin mengkristal. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sudah terang-terangan mengungkapkan aspirasinya mendukung SBY sebagai ketua umum.

"Aspirasi dari DPD dan DPC agar Pak SBY menjadi ketua umum melalui forum KLB (kongres luar biasa) semakin mengkristal," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Jakarta, Rabu (27/3).

Ramadhan menjelaskan, sudah sebanyak 25 DPD Partai Demokrat yang menyatakan secara terang-terangan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono agar menjadi ketua umum.

Ia memperkirakan, jika SBY sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon ketua umum Partai Demokrat, maka kandidat lainnya dengan jiwa besar akan mundur.

"Dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat. Saya meyakini seluruh kader ingin menyelamatkan Partai Demokrat," ucapnya.

Ramadhan membantah, jika usulan yang menguat agar SBY memimpin Partai Demokrat merupakan upaya dominasi politik dari keluarga Cikeas.

"Pak SBY memimpin Partai Demokrat hanya untuk mengembalikan tingkat elektabilitas yang telanjur merosot, hingga kongres pada 2015," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan juga di sela-sela pertemuan "High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda" di Nusa Dua, Bali, kemarin mengatakan bahwa SBY bisa dipastikan menjadi ketua umum partai berlambang segitiga mercy itu. Pasalnya hingga saat ini belum ada satu pun kandidat yang secara resmi mencalonkan diri.

"Berapa kandidat? Tidak ada kandidat yang maju," katanya. Tetapi menurut Syarifuddin, meski sebagian besar kader menginginkan SBY maju, tidak menutup kemungkinan calon lain untuk maju.

"Kalau ada yang maju, sah-sah saja. Bukan soal diizinkan atau tidak. Kan yang memiliki hak suara DPP ada empat suara, masing-masing DPD (2), DPC (1) dengan jumlah DPC sebanyak 497," ujarnya.

Terkait tugas SBY sebagai presiden bila ia terpilih menjadi ketua umum, Syarifuddin mengatakan, kemungkinan akan ada ketua teknis dan pengurus yang akan bertugas untuk kegiatan sehari-hari. ■ Aliyudin Sofyan/Antara

Jurnal Nasional  
28 Maret 2013

# Hari Ini, Anas Resmi Diberhentikan

30

Sanur | Jurnal Nasional

ADA tiga agenda dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan dibuka hari ini, Sabtu (30/3). Agenda pertama yakni memberhentikan tetap Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum.

"Agenda pertama menurut yang dibikin OC (*organizing committee*), kongres memberhentikan Pak Anas. Karena Pak Anas *kan* mengatakan, yang bisa memberhentikan beliau itu kongres," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik saat ditemui di acara geladi kotor KLB Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (29/3) malam.

Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua KPU RI itu diduga menerima gratifikasi terkait proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jero menjelaskan, usai seremoni pemberhentian Anas, agenda dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum.

Ia mengisyaratkan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bakal dipilih sebagai ketua umum pengganti Anas. Agenda terakhir KLB yakni penyempurnaan AD/ART Partai Demokrat.

Menurut Jero, penyesuaian aturan internal partai ini terkait dengan pencalonan SBY sebagai ketua umum. Apabila SBY bersedia mengemban jabatan ketua umum maka akan ada penambahan wakil ketua umum dan penunjukan ketua harian.

"Setelah itu maka perlu perubahan AD/ART, mungkin waketumnya ditambah atau mungkin ada ketua harian untuk memperkuat pengurus harian. Sehingga tidak akan merepoti beliau (SBY), sehingga beliau bisa fokus urus negara," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. ■ Melati Hasanah Elandi

27 Mar

# JK: Tidak Salah SBY Jadi Ketua Umum

Depok | Jurnal Nasional

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mentakan, keinginan kader dan simpatisan Demokrat agar SBY menjadi ketua umum tidak salah. Menjadi ketua umum sebuah partai politik juga dialami oleh Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid saat menjabat sebagai presiden.

"Saya saat menjabat wakil presiden juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar," kata JK saat menjadi keynote dalam peluncuran buku pertama tentang "Kebakaran" oleh pakar kebakaran Indonesia, Fatma Lesari, Selasa (26/3).

Meskipun demikian, JK mengaku tidak mudah saat ini bagi SBY untuk menjadi ketua umum Demokrat. Sebab, banyak masalah negara yang harus diselesaikan oleh Presiden.

"Tapi apakah dengan kesibukan beliau bisa urus partai sekaligus, itu yang harus dicermati. Bukan berarti tidak boleh, tapi kan tidak mudah, itu pengalaman saya," ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak permasalahan negara yang harus menjadi perhatian Presiden. Semua bagian

dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu rakyat juga kerap meminta agar Presiden fokus pada masalah kenegaraan. Diantaranya adalah masalah penembakan tahanan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman.

Dia mendesak semua pihak dan aparat untuk menyelidiki, menangkap, dan menindak pelaku penyerangan terhadap tahanan tersebut. "Saya kira kita semua sependapat, bahwa apa pun alasannya tindakan seperti itu adalah tindakan yang melanggar hukum," kata dia.

JK meminta pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum di Indonesia turut serta dalam upaya mencari tahu pelaku dalam insiden tersebut. Semua pihak baik itu kepolisian maupun dari TNI harus berusaha mengusut secara tuntas peristiwa tersebut.

Dia menegaskan hal ini bukan upaya adu domba antara TNI dan Polri. Namun memang tugas upaya bersama untuk mengusut tuntas kasus tersebut. "Semuanya harus mencari tahu siapa pelakunya," ujarnya.

■ Iskandar hadji

# Ibas Ajak Kader untuk Bangkit

Masih banyak lagi perjuangan yang harus kader lakukan bersama.

Friderich Batari

friderich@jurnas.com

## Nusa Dua | Jurnal Nasional

**S**EKRETARIS Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan kader dan simpatisan partai agar tidak berkecil hati bila elektabilitas Demokrat sempat menurun akibat sejumlah kader menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi.

Ibas mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bangkit dan menunjukkan kembali kejayaan partai yang pernah diraih

sebelumnya. "Jangan kita berkecil hati, karena kita akan memenuhi harapan masyarakat dan seluruh kader di Tanah Air," kata Ibas saat memberi sambutan pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (30/3) siang.

Menurut Ibas, setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan langkah-langkah penyelamatan partai, elektabilitas Partai Demokrat diharapkan mulai meningkat. "Ini patut kita syukuri bersama. Langkah-langkah strategis akan ditanggapi positif oleh masyarakat dan ini senantiasanya terus kita perjuangkan," katanya.

Menurut Ibas, kiprah Partai Demokrat tidak cukup sampai KLB saja. "Masih banyak lagi perjuangan yang harus kita lakukan ber-

sama. Semangat seluruh kader Partai Demokrat dalam membangun dan menjalankan kepentingan rakyat harus terus bergemuruh dan terasa di seluruh pelosok Tanah Air," ujarnya.

Untuk memantapkan itu, kata Ibas, Partai Demokrat melaksanakan KLB setelah Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum, mengundurkan diri. "Ini KLB pertama yang kita lakukan. Dan, kita harapkan acara ini perlu dijalankan secara tertib, teduh, lancar, dan penuh kekompakan kita semua," katanya.

Ibas juga mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk menjaga KLB tetap berada pada jalur demokrasi. "Musyawarah mufakat juga bagian demokrasi. Dan ini harus kita jaga untuk merefleksikan kembali khitah Partai Demokrat sebagai partai yang cerdas, bersih, dan santun," katanya. ■

Minggu, 31 Maret 2013

Aburizal Bakrie<sup>28</sup>

## Akui Kualitas SBY

Medan | Jurnal Nasional

KETUA Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengakui ketangguhan politik dan individu Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Hal itu dikatakannya saat diwawancarai *Jurnal Nasional* ketika berada di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Rabu (27/3).

Aburizal, ketika ditanya soal serangkaian kekalahan partainya dalam sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, mengalihkan jawabannya, sambil menyebutkan bahwa dalam pesta demokrasi yang berlangsung selama ini di seluruh daerah, merupakan sebuah pertarungan antarkandidat atau individu. Dirinya mengelak jika itu dikatakan kekalahan partai, sebab pilkada itu bukan pertarungan antarpolisi politik.

Disebutkannya, menang tidaknya sebuah calon atau kandidat dalam pemilihan, tergantung pada sosok atau calon yang diusung oleh sebuah partai politik.

Aburizal memberikan contoh soal bagaimana ketangguhan SBY yang bisa menang telak menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004. Partai pengusungnya yaitu Demokrat hanya mengantongi suara sebesar 7 persen, namun sosok SBY membuat dirinya menang telak dan mengantongi suara mencapai lebih dari 61 persen.

Menurutnya, kemenangan SBY itu bukan bagaimana tim sukses atau partai politik pendukungnya mampu menarik hati rakyat untuk memilih. Tetapi kemenangan itu karena faktor sosok dan calon dari Partai Demokrat tersebut yang akhirnya dipilih rakyat.

"Jadi melihat calon itu menang atau tidak tergantung sosoknya. Partai Golkar menganggap dalam pemilihan diusung partai politik itu murni individu, jadi *gak* ada kekalahan di Partai Golkar. Ya contohnya Pak SBY," jelas Aburizal Bakrie.

Sementara itu, ketika ditanya soal konsep Presiden SBY mengenai pembangunan kesejahteraan rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan ada beberapa hal yang perlu di tinjau ulang. Salah satunya soal subsidi BBM yang diberikan saat ini, dapat diganti menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, dan pembangunan infrastruktur melibatkan swasta sudah dilakukan pemerintah.

Dikatakannya, indikator meningkatkan kesejahteraan, dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang harus meningkat, dan jika itu berhasil, maka sukseslah sasaran pembangunan tersebut.

Dikatakannya, pembangunan ekonomi merupakan sasaran bagi pembangunan manusia. Tanpa pembangunan ekonomi, maka tidak akan mempunyai suatu dana untuk membangun sumber daya manusia. Sehingga itu harus terus dijalankan oleh Pemerintahan dipimpin oleh SBY. ■ Heri Surbakti

# Antisipasi Kader Demokrat dari HMI

Jakarta | Selasa, 5 Mar 2013

Aliyudin Sofyan

Serangan terhadap Partai Demokrat dianggap sebagai bentuk ketidakdewasaan berpolitik.

Serangan-serangan yang dilancarkan sejumlah pihak, termasuk sebagian kader aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) terhadap Partai Demokrat, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun daerah dianggap sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik. Selain itu, ada ketakutan partai ini akan kembali memimpin pada Pemilu 2014 mendatang.

"Konsolidasi di DPD dan DPC Partai Demokrat harus terus dilakukan. Saya rasa kader yang berlatar belakang HMI patut diantisipasi. Karena mereka pasti akan membela Anas (mantan ketua umum Partai Demokrat), yang juga kader HMI," kata praktisi dan dosen politik Universitas Dharma Agung, Chairuddin Sirait di Medan, Sumatera Utara, Senin (4/3).

Chairuddin bahkan menyarankan agar untuk saat ini tidak usah lagi memakai kader HMI. "Karena mereka pasti akan terus menyerang dan merusak partai, hingga pucuk pimpinan mereka ambil alih," ujarnya.

Menurutnya, serangan terhadap Partai Demokrat di daerah, khususnya Medan, terlihat dari serangan yang diarahkan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Saleh Bangun. Saleh diserang oleh sejumlah partai politik baik yang ada di legislatif maupun di kepengurusan partai politik lain, soal adanya surat usulan pembatalan pelantikan gubernur defenitif Gatot Pujo Nugroho yang ditandatangani Bangun.

Anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar, Chaidir Ritonga, dari Partai PDI Perjuangan, Syamsul Hilal, dan Anggota DPRD Sumut dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Pramono Asri, dan sejumlah anggota partai politik lainnya. Mereka menganggap pembatalan yang dilakukan oleh Saleh Bangun itu merusak citra legislatif. Tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Fraksi Partai Demokrat, komentar mosi tidak percaya pun dilontarkan.

## DCS Demokrat

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat yang juga salah seorang pendiri Partai Demokrat, Sutan Bhatogana mengatakan, kehebohan mengenai kesulitan Partai Demokrat dalam proses pendaftaran calon legislatif ke KPU akibat ketidakadaan ketua umum hanya diributkan oleh pihak eksternal Partai Demokrat.

"Ada 1001 jalan menuju Roma kata orang. Kita pun demikian memiliki banyak cara mengatasi permasalahan ini. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Sutan.

Dalam UU KPU menurut Sutan jelas tertulis bahwa yang menandatangani DCS adalah ketua umum dan sekjen atau sebutannya. Partai Demokrat tidak mau terkungkung dengan masalah itu dan proses penjangkaran tetap masih dijalankan seperti biasa.

"Jadi jika ketua umum mundur maka penggantinya apa pun sebutannya bisa menjalankan tugas sebagai ketua umum. Jadi apa pun sebutannya yang penting itu diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

Mengenai mekanisme apa yang akan ditempuh Partai Demokrat untuk mengisi kursi ketua umum, Sutan mengatakan bahwa KLB adalah jalan yang terbaik karena ketua umum berhalangan tetap dan sesuai AD/ART maka itu harus dilakukan. **n Heri Surbakti/Rhama Deny**

# Ketua Umum PD Tak Perlu Menjadi Capres 2014

Jakarta | Rabu, 13 Mar 2013

N. Syamsuddin CH. Haesy

KRISIS Partai Demokrat (PD) akan berlalu. Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar dalam waktu dekat, insya Allah akan menjadi solusi, agar PD keluar dari krisis. Syaratnya, pilih kader utama yang mau sepenuh waktu memimpin partai ini, dan tak berambisi menjadi calon presiden (Capres) atau jabatan publik lainnya.

Keyakinan itu mengemuka dalam percakapan *Jurnal Nasional* dengan Agus Abubakar Arsal Alhabsy, anggota kelompok kerja strategis, Dewan Pembina Partai Demokrat, Senin (11/3) di Jakarta.

Agus yang populer juga dipanggil Habib Agus, mengisyaratkan, KLB harus memusatkan perhatian pada pemilihan dan penetapan Ketua Umum partai berlambang *mercy*, itu. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ruswah Hambalang, Anas Urbaningrum yang terpilih dalam Kongres II PD di Bandung, menyatakan berhenti dari jabatan dan keanggotaan di partai itu. Anas, bahkan, melepaskan baju partai yang kerap dipakainya selama menjabat Ketua Umum PD di hadapan pers.

Menurut Habib Agus, konsolidasi total partai, hanya akan mungkin terjadi, bila partai dipimpin oleh kader utama. Dan sungguh sepenuh hati mengurus partai, dan tidak tergoda dengan ambisi politik pribadi.

"Jika memungkinkan adalah sosok yang terlibat sejak awal dalam sejarah PD, paling tidak deklarator berdirinya PD, sehingga lebih mudah merangkul kembali 'veteran' PD," cetusnya.

Ketua Umum PD kelak, juga harus seorang yang tidak tersangkut dengan kasus-kasus hukum, baik langsung atau tidak langsung, khususnya korupsi, agar tidak diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dengan begitu, tidak menjadi jadi sasaran tembak media dan lawan politik," cetusnya, kalem.

Habib Agus tak menafikan di dalam PD terdapat faksi-faksi. Karenanya, menurut dia, Ketua Umum PD juga harus diterima oleh mayoritas kader yang berbeda dalam PD, agar lebih efektif mempersatukan kembali kekuatan yang rawan terpecah-pecah.

"Dia juga harus bersedia bekerja *full time* mengurus partai, dengan meninggalkan jabatan publik atau jabatan politik lainnya. Fokus sajalah mengurus manajemen partai," ujarnya.

Ketua Umum PD kelak, tak perlu menjadi Capres 2014. "Dia harus berjanji, tidak akan maju sebagai calon presiden maupun berambisi untuk jabatan politik lainnya, agar mampu menghindari konflik kepentingan," jelas Habis Agus, lagi.

Pastinya, Ketua Umum PD, menurut dia, harus mampu mengelola partai sesuai dengan prinsip *good party governance*, tata kelola partai yang baik. Juga mampu mengembangkan prinsip kolektif kolegial, sehingga kebersamaan dalam kepemimpinan dan pengurusan partai, dapat terjamin.

Habib Agus mengingatkan, agar Ketua Umum PD kelak, harus mau dan mampu melibatkan seluruh pengurus harian secara aktif. Agenda-agenda partai, seperti rapat harian harus dilaksanakan secara konsisten. Begitu juga dengan transparansi keuangan partai, harus dilakukan sesuai dengan prinsip audit yang benar.

Selain itu, hubungan dengan Dewan Pembina harus pula dimaksimalkan. "Dewan Pembina, pun harus lebih serius mengurus partai. Minimal, sepekan sekali dilakukan Rapat Dewan Pembina. Jangan biarkan partai ini, seperti rumah tanpa kepala keluarga," serunya.

Terkait isu ada kesengajaan menggusur kader muda dari kalangan tertentu, Habib Agus tak melihat ada indikasi demikian. "Tidak ada itu. Ini partai terbuka, silakan kader terbaik yang berkualitas, cerdas, dan berakhlak berkompetisi untuk berkarya di sini," ujarnya.

Habib Agus berharap, semua kader tidak mudah terkecoh dengan isu yang berkembang dan dikembangkan dari luar partai. "Mari kembali benahi dan urus partai ini dengan cara yang benar," tukasnya. n *Bang Sem*

## Demokrat Pastikan Gelar KLB

Jakarta | Senin, 11 Mar 2013

Aliyudin Sofyan

Jika faksi-faksi di tubuh Demokrat hilang, partai itu dapat kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2014.

SEKRETARIS Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, memastikan akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Agenda utama KLB Partai Demokrat adalah untuk memilih ketua umum yang baru menggantikan Anas Urbaningrum.

"Sepertinya sih agak miring-miring ke KLB (Kongres Luar Biasa)," kata Jero Wacik di Jakarta, Minggu (10/3).

Meski belum menyebutkan tanggal pelaksanaan KLB, namun Jero Wacik yakin bahwa KLB bisa dilaksanakan. "Soal waktu gampang," kata Jero singkat.

Menurut dia, KLB akan digelar terutama untuk memilih ketua umum yang baru. KLB juga dimaksudkan agar ketua umum dan sekjen partai yang baru nanti bisa menandatangani daftar caleg sementara (DCS) atau daftar caleg tetap (DCT) Demokrat untuk DPR RI. Penyerahan DCS ke KPU paling lambat 9 April 2013 dan DCT Agustus 2013.

Jero sendiri mengaku telah diperintahkan langsung oleh SBY untuk menyiapkan KLB sebelum masa penyerahan DCS Partai Demokrat ke KPU. "Saya sudah diminta Ketua Majelis Tinggi untuk mempersiapkan KLB," ucap dia.

Berbeda dengan Jero Wacik, Ketua DPP Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat MRR RI, Muhammad Jafar Hafsa menyarankan KLB dilaksanakan setelah situasi partai kondusif. Faksi internal hingga saat ini masih ada.

"Posisi ketua umum yang ditinggalkan Anas masih diambil alih majelis tinggi, setelah konsolidasi internal tuntas dan kondisi partai sudah kondusif. Maka selanjutnya akan digelar KLB agar nantinya setelah KLB tidak lahir faksi-faksi baru lagi," kata dia.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit juga meyakini jika faksi-faksi di tubuh Partai Demokrat hilang, maka partai itu dapat kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2014. "Kalau semua golongan itu bisa dipersatukan, calon siapa pun dimajukan akan menang," kata Arbi.

Menurut Arbi, sejauh ini setidaknya ada tiga faksi pada Partai Demokrat yaitu faksi Anas Urbaningrum, sebagai orang yang pernah berkuasa di jajaran DPP. Kemudian faksi Marzuki Alie yang pernah menjadi pesaing Anas dan kalah saat kongres di Bandung pada tahun 2010 lalu. Faksi ketiga adalah pengikut Andi Mallarangeng yang juga pesaing Anas dan kalah di Kongres yang sama.

Arbi mengatakan, Marzuki Alie yang saat ini menjadi Ketua DPR RI terlihat masih sangat berhasrat untuk menduduki kursi ketua umum Partai Demokrat. Hal itu terlihat dari berbagai pernyataannya di berbagai kesempatan, termasuk di media massa.

Marzuki Alie sendiri mengaku telah didukung oleh sejumlah DPD dan DPC di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Indonesia bagian Timur. Marzuki pun menegaskan, jika terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat, tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ia yakin sanggup menyinergikan amanat dalam dua jabatan politik sekaligus.

"Keduanya itu sama-sama pekerjaan politik, bisa dikerjakan secara sinergis," kata dia. n **Friederich Batari/Rhama Deny/Heri Arland**

## SBY Kantongi Nama Calon Ketua Umum

Jakarta | Rabu, 20 Mar 2013

Aliyudin Sofyan

Demokrat harus lakukan istitusionalisasi partai, sehingga siapapun yang jadi ketua umum, partai tetap jalan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut sudah mengantongi nama calon ketua umum sebagai pengganti Anas Urbaningrum yang akan disahkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) akhir Maret mendatang.

Anggota Dewan Pembina (Wanbin) DPP PD, Adjeng Ratna Suminar mengungkapkan, SBY telah memiliki nama-nama yang sudah diseleksi sebagai calon ketua umum. Namun, dia enggan membuka nama-nama yang sudah dikantongi SBY tersebut.

"Iya, betul sudah ada nama calon ketum. Tidak hanya dua nama, tapi satu, dua, tiga," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut dia, calon ketua umum yang akan dipilih merupakan tokoh senior di PD, karena SBY menginginkan figur ketua umum yang bisa mempersatukan partai dan menghilangkan faksi-faksi yang saat ini ada di internal PD.

Namun, pendapat tersebut dibantah anggota MTP, Max Sopacua yang menegaskan bahwa hingga kini SBY belum mengantongi nama-nama calon ketua umum, sehingga nama-nama yang beredar masih memiliki peluang besar.

"Saya tidak pernah dengar ada dua nama, kami belum memutuskan nama. Saya kira Pak SBY belum menentukan, jadi tidak ada isu beliau sudah kantongi nama," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa nama-nama yang saat ini beredar seperti Marzuki Alie, Saan Mustopa, dan Hadi Utomo masih berpeluang untuk menjadi ketua umum.

Sementara itu, Ketua DPP PD Bidang Pemenangan Pemilu, Agus Hermanto mengatakan, nama mantan Ketua Umum PD, Hadi Utomo mulai diperhitungkan sebagai calon pengganti Anas Urbaningrum karena dukungan dari DPD dan DPC mulai bermunculan.

"Kita tentunya berdasarkan dari teman-teman, ketua-ketua DPD, DPC banyak sekali dukungan kepada Hadi Utomo, tapi semua harus dibicarakan lebih lanjut, menuju sampai KLB dilaksanakan tanggal 30-31," tuturnya.

Adapun Wakil Sekjen DPP PD, Saan Mustopa menegaskan kembali kesiapannya untuk bertarung dalam KLB nanti. Kendati demikian, dia tidak berniat untuk mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Saat ini, lanjut Saan, dirinya lebih memilih terus menjalin komunikasi dengan DPD dan DPC yang memiliki hak suara. "Komunikasi tetap kita jalankan. Komunikasi itu bukan dalam rangka menggalang dukungan, tapi silaturahmi. Dukungan soal lain," imbuhnya.

Anggota MTP, Jhonny Allen Marbun memaparkan, sumber dana yang digunakan untuk menggelar KLB berasal dari iuran rutin anggota Fraksi PD yang mencapai Rp750 juta, selain juga dari iuran rutin kader-kader partai. Oleh karena itu, dalam KLB mendatang semua peserta tidak mendapatkan bantuan transportasi kecuali akomodasi di lokasi KLB.

"Transport dari daerah ditanggung masing-masing peserta, semua anggota bayar ongkos sendiri. Panitia tidak siapkan itu, kecuali ongkos penginapan," katanya.

Terpisah, peneliti LIPI Indria Samego mengatakan, personalisasi terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, membuat partai tersebut tidak sehat. Sebab, saat Anas Urbaningrum tersandung kasus, membuat Demokrat menjadi gagap akibat terlalu SBY-sentris.

"Padahal seharusnya dilakukan adalah institusionalisasi partai. Jadi, siapapun yang memimpin, partai tetap bisa jalan terus dan tidak seperti sekarang," ujarnya. n Rhama Deny

## KLB Demokrat

### Tempuh Jalur Musyawarah Mufakat

Jakarta | Jum'at, 22 Mar 2013

Friederich Batari

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengharap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Bali, 30-31 Maret 2013 mendatang berjalan dengan baik.

Momentum tersebut harus diarahkan untuk mengukuhkan konsolidasi dan memperkuat soliditas seluruh kader Partai Demokrat agar siap menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. KLB diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang diperoleh melalui mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan salah satu cara dalam proses demokrasi.

"KLB ini diharapkan berjalan sederhana, khidmat, teduh, dan menghasilkan kesepakatan bersama yang bisa diperoleh melalui cara musyawarah, yang merupakan bagian dari proses demokrasi," ucap Ibas di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/3).

KLB terpaksa digelar setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengundurkan diri pasca ditetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Partai Demokrat harus memilih ketua umum baru terkait proses seleksi calon legislatif (caleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Peraturan KPU menyebutkan bahwa daftar caleg yang diajukan sah apabila diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai. Wajar jika menjelang KLB, sudah bermunculan nama-nama yang dianggap layak menempati jabatan ketua umum.

Namun, Ibas menyatakan, Demokrat belum menentukan nama calon ketua umum. "Partai Demokrat belum secara resmi memberikan nama calon ketua umum. Hanya Tuhan, Bapak SBY, dan Peserta KLB yang nantinya tahu," kata Ibas.

Dia memastikan, calon ketua umum adalah kader partai. Karenanya, dia menegaskan, siapapun yang terpilih menjadi ketum di KLB nanti, merupakan tokoh yang dapat diterima seluruh kader Demokrat. "Orang tersebut adalah benar-benar kader Partai Demokrat," tegasnya menjawab wartawan yang menanyakan kemungkinan calon ketua umum dari luar partai.

Ibas mengapresiasi munculnya sejumlah nama calon ketua umum yang berkembang di media. Dia menghargai nama-nama kandidat itu karena berangkat dari aspirasi para kader. "Kami menghargai nama-nama yang berkembang karena itu merupakan aspirasi kader Partai Demokrat," katanya.

Dalam menentukan calon ketua umum, Ibas menjelaskan, akan dibahas dalam KLB dan sesuai aturan main partai. Dia juga mengingatkan, KLB bukan sesuatu yang istimewa. Apalagi, Partai Demokrat, kata dia, tidak mengharap digelar KLB. Namun, karena situasi yang berkembang pasca berhentinya Anas Urbaningrum dari Ketua Umum Partai Demokrat, maka KLB harus dilaksanakan.

Sementara terkait peserta KLB nanti, Ibas menjelaskan, Partai Demokrat memiliki aturan main mengenai peserta dan peninjau KLB. Aturan main partai akan mengundang peserta dari DPP maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dalam KLB nanti, Ibas akan menjabat Ketua Panitia Pengarah. Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sapacua menjadi Ketua Panitia Pelaksana.

Max Sapacua juga menyatakan DPP Partai Demokrat belum pernah membahas nama-nama calon ketua umum. Namun, dia memastikan, kriteria calon ketua umum adalah kader Partai Demokrat yang minimal lima tahun aktif di kepengurusan partai. "Jangan karena sudah pakai baju Demokrat lalu langsung menjadi calon ketua umum. Tetapi, kader yang minimal lima tahun di kepengurusan," katanya.

Kriteria lainnya, menurut Max, calon ketua umum tidak mencalonkan diri menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres). Max juga mengatakan, tidak mempermasalahkan calon ketua umum yang rangkap jabatan. Kriteria itu nantinya menjadi bagian yang akan dibahas dalam proses persidangan di KLB.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik sebelumnya juga menyatakan, calon ketua umum Partai Demokrat tidak akan berpotensi memicu konflik di internal Demokrat. Sosok ketua umum juga bukan dari kalangan eksternal partai dan tidak digadang-gadang sebagai capres. Menurut Jero, calon ketua umum adalah sosok yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ibas juga mengatakan, Partai Demokrat mengajak tokoh-tokoh dari masyarakat, perempuan, pemuda, tokoh agama, dan pihak lain yang berpotensi memajukan bangsa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat. "Proses penjangaran

caleg PD dilakukan oleh Satgas Penjaringan yang dipimpin Suadi Marasabessy dan prosesnya sendiri masih berlangsung hingga saat ini," kata Ibas.

Dia menjelaskan, persyaratan untuk menjadi Caleg Partai Demokrat disesuaikan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disesuaikan dengan persyaratan internal Partai Demokrat. Dalam penentuan daftar caleg sementara (DCS) akan dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dengan begitu, bakal caleg nantinya yang diterima masyarakat adalah kader Demokrat yang memiliki integritas, loyal, dan berkomitmen menjalankan amanah masyarakat.

**Friederich Batari/M. Fauzi Ridwan**

## KLB Selamatkan Partai Demokrat

Sanur | Minggu, 31 Mar 2013

Rihad Wiranto

Secara aklamasi, SBY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY menegaskan akan tetap mengutamakan tugas demi menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan.

KONGRES Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menjadi tonggak baru menuju kebangkitan dan kejayaan partai. Melalui persatuan dan kekompakan, kerja keras dan upaya cerdas, Partai Demokrat akan selamat, bangkit, dan berjaya lagi.

Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para kader untuk melanjutkan pembenahan serta meningkatkan diri dengan terus berkarya demi kesuksesan pada masa datang. "Yang menjadi motor penggerak dalam upaya besar ini adalah DPP, DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia," kata SBY dalam pidato sebagai Ketua Umum, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (30/3) malam.

Menurut SBY, pembenahan partai dan peningkatan kemampuan para kader akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Partai Demokrat.

"Saya mendengar, banyak yang menyampaikan kepada saya, bahwa ada anggapan sejumlah kader Partai Demokrat melakukan penyimpangan termasuk korupsi. Sebenarnya, banyak juga dilakukan oleh kader-kader partai lain," kata SBY.

SBY mengingatkan agar kader tidak mengurus partai lain. "Kita urus diri kita sendiri. Kita bikin baik partai sendiri, rakyat akan menjadi hakim. Inya Allah kalau kita terus berbenah diri, memperbaiki diri, mencegah hal-hal yang tidak baik, maka di masa depan rakyat akan memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat," kata SBY menegaskan.

Kepada para kader, SBY mengingatkan agar tidak melakukan praktik dan perilaku politik yang tidak baik. "Mari kita sama-sama menjaga diri, saling mengingatkan jangan sampai kita melakukan tindakan menyimpang," ucap SBY tegas.

SBY juga mengingatkan para kader jangan memungut uang untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri seperti dalam pencalonan caleg untuk pemilu 2014. "Kecuali untuk kepentingan biaya administrasi dan bantuan kepada partai yang pantas. Itu silakan, tetapi konsepnya bukanlah suap. Mari kita sama-sama kita jalankan," katanya. SBY menyatakan jika ada yang merasa diminta atau diperas, apalagi sampai masuk ke kantong sendiri, segeralah memberitahu Komisi Pengawas.

Lebih lanjut, SBY meminta seluruh kader terus meningkatkan kemampuan diri dan senantiasa menjaga integritas kepribadian. "Siapa pun yang ingin menjadi pejabat di lembaga eksekutif baik menjadi presiden, wapres, sampai bupati/wali kota, siapakanlah kemampuan Saudara. Calon tidak hanya memiliki popularitas, tapi juga mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas," katanya.

SBY menginstruksikan kepada para kader Partai Demokrat dalam rangkaian Pemilu 2014 agar melakukan kampanye yang baik. SBY mengingatkan jangan melakukan cara-cara tidak baik seperti

kampanye hitam. "Ingat Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, kita tidak pernah melakukan itu. Kita menjauhi cara-cara buruk dalam politik," tegas SBY.

KLB di Bali, kata SBY, merupakan ajang untuk memperkokoh kekompakan. "Tidak ada kamus gusur-mengusur. Tidak ada kamus bersih membersihkan. Jika ada penataan justru untuk memastikan semua elemen di partai ini terwakili di dalam formasi kepengurusan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," katanya.

Dalam kesempatan itu, SBY menegaskan akan tetap mengutamakan pekerjaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan kendati menjabat ketua umum partai.

"Dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara atau Presiden RI, saya tetap akan memprioritaskan pekerjaan atau kegiatan untuk menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan kenegaraan," kata SBY menegaskan. "Apa yang saya telah lakukan selama delapan setengah tahun ini, akan tetap dan terus saya lakukan."

SBY meminta rakyat Indonesia untuk mengawasi, mengingatkan dan memberikan kritik jika dirinya ternyata lebih mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara. "Partai Demokrat juga mohon diawasi, diingatkan, dan dikritik jika memiliki perilaku yang tidak baik. Kami, jajaran Partai Demokrat sungguh serius untuk kembali ke titah atau jati diri dan prinsip-prinsip politik kami yang cerdas, santun dan bersih," katanya. n **Friederich Batari**



# Yudhoyono Tidak Konsisten

## Struktur Partai Demokrat Melecehkan Prinsip Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah keputusan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbulkan kesan dia bingung menyikapi kondisi partainya. Sejumlah keputusan juga dianggap bertentangan dengan pernyataannya terkait kepemimpinan partainya.

Demikian disampaikan pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, dan Yunarto Wijaya dari Charta Politica, secara terpisah, Minggu (31/3), di Jakarta.

Andrinof mengatakan, Yudhoyono harus mencari alasan pembenaran atas langkahnya menunjuk Syarifuddin Hasan sebagai Ketua Harian dan EE Mangindaan selaku Ketua Harian Dewan Pembina. Pasalnya, mereka adalah menteri dan Yudhoyono berkali-kali mengingatkan agar menteri fokus mengerjakan tugas pemerintahan daripada partai.

"Dalam pidatonya pada Sabtu malam, Yudhoyono mengatakan, tugas harian akan dilakukan oleh Ketua Harian dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, yaitu Marzuki Alie. Jadi, Syarifuddin Hasan, EE Mangindaan, dan Marzuki Alie akan disibukkan oleh tugas harian partai. Lalu, kapan mereka menjalankan tugas sebagai menteri dan Ketua DPR?" tanya Andrinof.

Lihat Video Terkait "Penunjukan Ketua Harian Partai Demokrat" di [vod.kompas.com/ketuaahandemokrat/](http://vod.kompas.com/ketuaahandemokrat/)



KOMPAS/RIZA FATHONI

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan ruangan setelah mengumumkan pengurus formatif Partai Demokrat, Minggu (31/3), di Bali. SBY menunjuk Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, Syarifuddin Hasan sebagai Ketua Harian, dan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina.

Menurut dia, keputusan Yudhoyono itu akhirnya hanya menambah masalah setelah dia bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Dengan Yudhoyono menjadi ketua umum, Demokrat semakin tergantung pada figur dia dan keluarganya. Padahal, berkali-kali Yudhoyono mengatakan, Partai Demokrat adalah partai modern sehingga tidak tergantung kepada figur, tetapi sistem," ucap Andrinof.

Ia melihat, sebagai keputusan Yudhoyono itu menunjukkan kebingungannya dalam menghadapi kondisi Partai Demokrat. "Oleh karena semua terpusat ke Yudhoyono, diduga para kader Partai Demokrat menjadi sungkan dan takut memberi masukan. Semua diserahkan kepada Yudhoyono. Ini makin membuat Yudhoyono bingung dan mungkin kesepian sehingga berpotensi membuat blunder," ujarnya.

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk In-

donesia, menilai, keputusan Yudhoyono memperlihatkan bahwa jargon-jargon ideal berbangsa dan bernegara telah dikalahkan. Negara kalah karena untuk pertama kali dalam sejarah partai politik dalam era Reformasi, semua jabatan dalam struktur partai politik diketuai seorang individu.

Prinsip negara agar partai dikelola secara partisipatif dan bagian dari pendidikan politik masyarakat hilang musnah dengan praktik tersebut. Struktur Partai Demokrat sekarang ini jelas mengaburkan pertanggungjawaban dan fungsi-fungsi tiap struktur partai secara internal.

"Jelas semangat seperti ini melecehkan prinsip demokrasi yang pada hakikatnya menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang saling mengoreksi dan seimbang," ungkap Ray.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikhrar Nusa Bhakti, Yu-

### SUSUNAN PENGURUS INTI DPP PARTAI DEMOKRAT 2013-2015 HASIL KONGRES LUAR BIASA 30 MARET 2013

| Pengurus/jabatan                             | Jabatan lain yang diemban   | Jabatan di pemerintahan  |
|--|---|--------------------------|
| Ketua Umum:<br>Susilo Bambang Yudhoyono      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Dewan Pembina</li> <li>• Ketua Majelis Tinggi</li> <li>• Ketua Dewan Kehormatan</li> </ul> | Presiden RI              |
| Ketua Harian:<br>Syarifuddin Hasan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Pembina</li> </ul>   | Menteri Koperasi dan UKM |
| Ketua Harian Dewan Pembina:<br>EE Mangindaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua Dewan Kehormatan</li> <li>• Anggota Dewan Pembina</li> </ul>                         | Menteri Perhubungan      |
| Wakil Ketua Majelis Tinggi:<br>Marzuki Alie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua Dewan Pembina</li> </ul>   | Ketua DPR                |



Sumber: Litbang Kompas/STN, diolah dari pemberitaan Kompas, Kompas.com, Tribun, dan sumber-sumber lain

GUNAWAN

doyono tidak memberikan te-  
ladan. Presiden seharusnya lebih  
fokus pada masalah negara. Hal  
itu juga menjadi antitesis dari  
pernyataan Presiden yang kerap

mengimbau para menteri dari  
jajaran partai politik untuk fokus  
pada tugas negara dan tidak sibuk  
dengan urusan partai.  
(NWO/ATO/OSA/DIK/?)

# Demokrat Mengharap Dispensasi dari KPU

## Amir: Tidak Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat berharap Komisi Pemilihan Umum dapat memahami masalah yang sedang mereka alami, yakni kekosongan ketua umum. Karena itu, Demokrat mengharapkan KPU membuat aturan baru terkait syarat pengesahan daftar calon anggota legislatif.

"Saya kira KPU menyadari bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang bisa mereka buat sesuai keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum ini dibiarkan dan semua orang diam saja," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Sabtu (2/3), di kompleks Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, se usai mengikuti rapat Partai Demokrat.

### Partai lain

Ia menambahkan, situasi yang dihadapi Demokrat bisa juga dialami partai lain. Karena itu, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan baru untuk pengisian kekosongan ketua umum sebuah partai secara umum dibutuhkan. "Situasi seperti ini bisa terjadi bukan hanya untuk kebutuhan Partai Demokrat," kata Amir.

Para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas. Para menteri dari Demokrat juga hadir. Selain Amir yang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri lain yang juga datang ialah Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga), EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), serta Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah). Rapat dimulai sekitar pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.45.

Sesuai aturan yang berlaku saat ini, daftar calon anggota legislatif yang diserahkan partai kepada KPU harus ditandatangani ketua umum serta sekretaris jen-

deral. Partai Demokrat mengalami masalah. Ketua umum mereka, Anas Urbaningrum, mundur karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek pusat olahraga Hambalang.

Menurut Amir, secara internal, Majelis Tinggi memiliki wewenang untuk menetapkan calon anggota DPR. "Dalam Anggaran Dasar sudah diatur bagaimana Majelis Tinggi memiliki kewenangan menetapkan, antara lain, calon anggota DPR," tuturnya.

Amir menolak mempertegas apakah sikap Demokrat yang memerlukan langkah terobosan KPU itu merupakan sinyal mereka enggan menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru. "Tidak usah Anda bertanya soal KLB hari ini. Yang penting ada dulu satu aturan yang mengakomodasi kekosongan hukum tadi," katanya.

### Hanya mengurus partai

Mengenai sosok pemimpin pengganti Anas, menurut Amir, disepakati sosok itu harus mampu 100 persen mengurus partai sampai akhir 2015. "Itu kriterianya. Jadi, tidak bisa orang-orang yang merangkap jabatan. Dia nanti hanya mengurus partai," ucapnya.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR menyatakan, di tengah problem yang dihadapi Demokrat, KPU harus menunjukkan diri sebagai lembaga yang profesional dan independen. "KPU bekerja untuk semua partai, tidak untuk partai tertentu," katanya.

(Bersambung ke hal 11 kol 1-4)

(Sambungan dari halaman 1)

Menurut Hanta, peraturan menegaskan, daftar anggota calon legislatif (caleg) harus ditandatangani sekretaris jenderal partai dan ketua umum, atau pejabat lain yang bertindak sebagai ketua umum sesuai Anggaran Dasar partai. Karena itu, tidak ada pilihan bagi Demokrat kecuali menggelar KLB untuk memilih ketua umum baru. "Partai Demokrat tidak dapat memaksakan pihak di luar DPP supaya dapat menandatangani daftar caleg," ujarnya.

Hanta melihat KLB sangat berisiko bagi Yudhoyono karena bisa saja muncul sosok ketua umum yang lagi-lagi tidak dikehendakinya. Marzuki Alie, yang pernah berkompetisi pada kongres lalu, masih memiliki kekuatan di KLB. Demikian pula kelompok pendukung Anas.

### Ruhut bicara

Kemarin siang, dalam diskusi Anak Bangsa bagi Negeri dengan tema "Peluang dan Tantangan Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Narkoba, dan Terorisme" di Jakarta, politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Partai Demokrat memastikan

akan mematuhi peraturan KPU yang mewajibkan adanya tanda tangan ketua umum untuk pengajuan nama-nama caleg. Pihaknya tidak akan menyalahi waktu dalam keikutsertaan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2014.

Dialog menghadirkan Permadi dari Partai Gerindra, anggota DPR Miryam Haryani dari Partai Hanura, dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Ruhut mengatakan, "Pertemuan di Cikeas memang akan memutuskan, antara lain, soal kongres luar biasa. Kami patuh kepada KPU. Orang yang disiapkan menjadi ketua umum sudah ada, tetapi kata orang Jawa selalu bilang *oyo kesusu* (jangan terburu-buru)."

Menurut Ruhut, pertemuan di Cikeas lebih bersifat *brainstorming* mengendangkan pengarahannya Yudhoyono. Intinya, segera ada ketua umum definitif, entah melalui KLB atau cara pendekatan lain. Memang sudah ada beberapa nama, tetapi Yudhoyono tetap menginginkan adanya demokrasi. Waktu pendaftaran caleg tanggal 9 April 2013.

"Agendanya KLB atau tidak. Biarlah otomatis, sebanyak 33

DPD, ketua Dewan Pembina, empat pelaksana. Sekitar 40 orang yang mempunyai hak Rambut sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu dalam pembuatan keputusan," ujar Ruhut.

### Loyalis Anas

Soal loyalis Anas, Ruhut meyakini politisi bisa berubah-ubah cara pandang. Sekarang bisa saja pasang badan membela Anas, tetapi begitu tidak ada keberpihakan, para loyalis bisa berbalik arah. Bahkan, ada loyalis yang diam-diam minta dicalonkan kembali dalam lembaga legislatif.

Kemarin, kediaman Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, didatangi beberapa orang. Mereka antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Abdul Kholik, Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku Umar Key Ohoitenan, dan sejumlah aktivis mahasiswa dari Banten. Mereka datang dan menemui Anas secara bergantian dari siang sampai sore.

Abdul Kholik mengatakan, dalam pertemuannya dengan Anas, mereka membahas musibah yang menimpa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu. "Kami mem-

bicarakan kasus Mas Anas dalam spektrum politik," ujarnya.

Abdul memaparkan, dalam pertemuan itu Anas membicarakan soal langkah-langkah ke depan yang akan diambilnya. Selain itu, persoalan calon ketua umum Demokrat juga sempat dibicarakan. "Mas Anas sempat menyebut beberapa nama yang banyak dibicarakan di media massa," ucapnya.

Sementara itu, Umar Key Ohoitenan menyatakan, kedatangannya bertujuan memberikan dukungan moril kepada Anas. "Kami sebagai organisasi pemuda ingin memberi dukungan kepada Mas Anas sebagai tokoh pemuda yang kami banggakan," katanya.

Umar menjelaskan, pihaknya sempat bertemu Anas dan membicarakan berbagai hal. "Mas Anas meminta pihak-pihak yang mendukungnya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terkait peristiwa ini," ujarnya.

Secara khusus, Umar juga mengomentari penarikan paspor Anas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beberapa waktu lalu. Menurut Umar, tindakan itu berlebihan. "Mas Anas kan tidak mungkin melarikan diri," katanya. (OSA/K02/ANA/ATO)

KOMPAS, 3 MARET 2013

# Pengurus Baru Harus Terdaftar

## Demokrat Isyaratkan Tunjuk Plt Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 yang mengubah kepengurusan di tingkat pusat harus segera mendaftarkan struktur barunya ke Kementerian Hukum dan HAM. Surat registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM bisa dilampirkan bersamaan dengan penyerahan daftar calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada tiga partai yang berubah kepengurusan di tingkat pusat, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, setiap perubahan kepengurusan harus didaftarkan di Kemenkumham.

Waktu registrasi ke Kemenkumham mendesak dilakukan karena masa pendaftaran caleg untuk Pemilu 2014 tinggal sebulan, yaitu 9-15 April. "Sampai saat ini, belum satu pun menyerahkan surat register kepengurusan dari Kemenkumham," kata Husni, Senin (4/3), di Jakarta.

Partai Nasdem dan PKS telah memilih pengurus baru. Hal ini berbeda dengan Partai Demokrat yang belum kunjung memilih pengganti Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

## PARTAI DEMOKRAT DAN LEGITIMASI KETUA UMUM

### HARAPAN DEMOKRAT

"Saya kira KPU menyadari bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang bisa mereka buat sesuai keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi kekosongan hukum ini dibiarkan dan semua orang diam saja."

"Dalam Anggaran Dasar (AD) sudah diatur bagaimana Majelis Tinggi memiliki kewenangan menetapkan, antara lain, calon anggota DPR."

(Anggota Dewan Pembina Demokrat, Amir Syamsuddin, 2/3/2013)

### ATURAN KPU

"KPU akan memproses pencalonan anggota legislatif sesuai aturan yang berlaku. Daftar calon harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga."

(Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, 3/3/2013)

"Wewenang penentuan calon anggota legislatif oleh partai politik boleh berbeda-beda, tergantung mekanisme yang berlaku di parpol tersebut. Namun, administrasi pencalonan anggota DPR tetap harus ditandatangani ketua umum dan sekjen atau sebutan lain."

(Anggota KPU, Sigit Pamungkas, 3/3/2013)

### Mekanisme Pencalegan dalam Partai Demokrat

- Keputusan calon anggota legislatif pusat adalah salah satu keputusan strategis partai (AD, Pasal 13 Ayat (5)).
- Calon anggota legislatif pusat diputuskan oleh Majelis Tinggi yang beranggotakan sembilan orang, antara lain Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (AD, Pasal 13).
- Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar (AD, Pasal 17).

Sumber: Litbang "Kompas"/NDW, diolah dari AD/ART Partai Demokrat dan pemberitaan "Kompas"

ANDRI

menyebutkan, pendaftaran calon anggota DPR dilakukan ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati mengisyaratkan, daftar caleg sementara Demokrat akan ditandatangani pelaksana tugas (plt) ketua umum. Penunjukan plt ini diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan organisasi Partai Demokrat. Penunjukan plt merupakan wewenang Majelis Tinggi.

"Saya tidak tahu apa yang akan diputuskan Majelis Tinggi. Saat ini, saya hanya berusaha menjelaskan, Anggaran Dasar dan peraturan organisasi kami memungkinkan penunjukan plt untuk menjalankan tugas ketua umum," ujarnya.

Husni mengatakan, KPU hanya akan menerima daftar caleg yang ditandatangani ketua umum dan sekjen atau sebutan

lain. Ketua majelis tinggi atau plt, sepanjang berkapasitas sebagai ketua umum/sekjen dan sudah didaftarkan di Kemenkumham, bisa diterima. Namun, mekanisme itu harus ada di AD/ART partai.

Sejumlah kalangan berharap Partai Demokrat segera menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih pengganti Anas.

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul meyakini, partainya segera menggelar KLB. Namun, menurut Nurpati, Demokrat lebih baik fokus pada usaha penjurangan caleg pada 6-31 Maret 2013 daripada menyiapkan KLB.

(ATO/INA/OSA/WHY/IAM/DIK/FAJ/LOK/ONG/DEN/K11)



Lihat Video Terkait

"Partai Demokrat Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu" di [vod.kompas.com/partaidemokratterancam](http://vod.kompas.com/partaidemokratterancam)

# SBY: Jangan Tergantung Figur

## Sebagai Ketua Umum, Tidak Ada Lagi Perisai bagi Yudhoyono

SANUR, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partai modern tidak boleh bergantung pada figur atau tokoh. Oleh karena itu, ia sejak dulu tidak menghendaki menduduki posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Partai modern harus berangkat dari platform dan mesin partai. Jangan bergantung pada figur," kata Yudhoyono, Sabtu (30/3), ketika memberikan orasi pemilihan dirinya secara akklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Sanur, Bali.

Menurut dia, KLB tidak direncanakan. Kongres luar biasa diadakan karena kondisi darurat.

mentara tidak memungkinkan, SBY mencoba mencari sosok ketua umum dan mekanisme yang tepat untuk memilihnya. Para pengurus berhasil menyepakati agar pemilihan berlangsung secara teduh dan damai, tetapi sosok ketua umum tetap tak ditemukan.

"Belum ada kesamaan pandangan. Lalu kalau pemilihan dilepas kepada floor, akan ada benturan. Hal ini menambah masalah di partai," tutur Yudhoyono. Sekitar 10 hari terakhir, muncul gagasan dari pengurus daerah agar Yudhoyono memimpin partai untuk sementara. Ia mengaku akhirnya bersedia menjadi ketua umum dengan

**Baca Juga**  
soal  
KLB

KLB Memang  
di Luar  
Kebiasaan

HAL 2

syarat jabatan itu diemban dengan sifat sementara. "Hanya dalam proses konsolidasi paling lama dua tahun. Bahkan, kalau bisa diakhiri segera setelah Pemilu dan Pilpres 2014 selesai. Setelah itu bikin kongres reguler untuk memilih ketua umum definitif lima tahun," kata Yudhoyono.

Syarat lainnya, manajemen sehari-hari partai diserahkan kepada pengurus harian DPP yang diketahui oleh ketua harian. Sosok yang menjadi ketua harian ini menurut rencana akan diumumkan Yudhoyono hari Minggu ini. Selain itu, Yudhoyono juga akan mengumumkan sosok ketua harian dewan pembina dan wakil

ketua majelis tinggi.

Sabtu pagi, beberapa jam sebelum KLB, Yudhoyono mengumpulkan para ketua DPD di sebuah hotel di Nusa Dua, Bali. Mereka diminta memilih dari 14 nama yang disodorkan sebagai calon ketua umum harian. Sekretaris Majelis Tinggi, Jero Wakretaris menyatakan, permintaan kepada ketua DPD untuk memilih nama calon ketua umum harian

(Bersambung ke hal 11 kol 4-7)

Lihat Video Terkait  
"SBY Ketua Umum Partai Demokrat"  
di [vod.kompas.com/sby/ketuaumdm](http://vod.kompas.com/sby/ketuaumdm)



# SBY: Jangan Tergantung Figur

(Sambungan dari halaman 1)

merupakan cara Yudhoyono untuk menjaring aspirasi. Penentuan akhir tetap di tangan SBY.

Dalam pesannya, Yudhoyono meminta agar kader terus menjaga integritas. Mereka jangan melakukan korupsi dan jangan memungut uang dalam pencalonan kepala daerah, presiden-wakil presiden, serta caleg. Ia juga meminta mesin partai di DPD dan DPC lebih diaktifkan.

## Anas di Bali

Selama kongres luar biasa berlangsung, mantan ketua umum Anas Urbaningrum tidak datang meski ia bersama istrinya berada di Bali untuk berlibur sekaligus menjenguk ibu Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang sedang sakit.

Pemilihan secara aklamasi itu dilakukan siang harinya yang dipimpin Ketua Presidium KLB Partai Demokrat EE Mangindaan didampingi petinggi Demokrat, Syarifuddin Hasan, Edhie Bas-koro Yudhoyono, Amir Syamsuddin, Toto Riyanto, Max Sopacua, dan Jhonny Allen. Saat itu, Mangindaan sempat mengatakan,

"Kami ingin beberapa DPD memberikan pandangan meskipun saya tahu sudah sepatok. Mari kita tunjukkan demokrasi dalam kongres ini."

Dalam mekanismenya, pemimpin kongres memilih secara acak empat wakil ketua DPD Partai Demokrat, yakni dari Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Pandangan umum DPD secara keseluruhan sudah satu suara, yakni meminta Yudhoyono sebagai ketua umum. Bahkan, DPD Jatim tak memberikan kesempatan lagi kepada DPD lain memberikan pandangan umum karena DPD Jatim langsung mengatasnamakan DPD Partai Demokrat se-Indonesia untuk mengusung SBY sebagai ketua umum periode 2013-2015. Hal itu langsung disambut teriakan setuju oleh para kader yang memiliki hak suara.

Seusai menyampaikan aspirasi DPD kepada SBY sekitar 30 menit, Mangindaan bersama petinggi Partai Demokrat lainnya kembali ke ruangan dan memimpin kongres. Dalam keputusannya, SBY menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum. "Beliau bersedia dengan syarat," ujar

Mangindaan.

Dalam persyaratannya, kata Mangindaan, SBY menginginkan amanah sebagai ketua umum hanya bersifat sementara. Ini hanya diterima sebagai proses penyelamatan dan konsolidasi partai dengan ketentuan paling lama dua tahun. SBY menginginkan, kalau boleh lebih cepat, yaitu setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden selesai, lalu dilanjutkan dengan kongres kembali.

Sambil membacakan jawaban Yudhoyono yang ditulis di memo kecil, Mangindaan mengatakan, "Syarat pertama, jabatan ketua umum yang akan saya jalankan benar-benar bersifat sementara. Ini prosesnya hanya penyelamatan dan konsolidasi partai yang kita cintai."

Syarat lainnya, Yudhoyono menginginkan bisa berkonsentrasi dan menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan, sementara tugas ketua umum akan dilaksanakan pengurus harian di bawah ketua harian. Yudhoyono mengingatkan, hampir seluruh tugas ketua umum yang dilaksanakan selama ini akan dilakukan oleh ketua harian.

Kemudian, Yudhoyono juga

meminta tugas ketua dewan pembina dilaksanakan oleh ketua harian dewan pembina. Begitu pula, tugasnya sebagai ketua majelis tinggi diserahkan kepada wakil ketua majelis tinggi. Persyaratan itu pun diulang dua kali agar semua kader memahami dan siap melaksanakan.

Peneliti politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Ridho Imawan Hanafi, di Jakarta, kemarin, mengatakan, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membawa konsekuensi kesiapan menghadapi penilaian publik secara langsung atas kinerja partai yang didirikannya itu. Dengan jabatan sebagai ketua umum, tak ada lagi tameng perlindungan atas baik-buruknya Partai Demokrat bagi sosok SBY.

Sekalipun bisa menunjuk ketua harian, menurut Ridho, tetap Yudhoyono sebagai ketua umumlah yang disorot publik langsung.

Menurut Ridho, masyarakat, dan terutama konstituen partai, menunggu bisa-tidaknya Yudhoyono membawa perbaikan partai, mengendalikan wacana mengenai format partai itu pada masa depan. (ATO/DIK/IAM/OSA)

## SBY Sebaiknya Mendengar Akar Rumput

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mendengarkan aspirasi dari akar rumput terkait pemilihan ketua umum baru pengganti Anas Urbaningrum. Yudhoyono tidak bisa lagi menggunakan pendekatan *top down* dalam menentukan nakhoda baru bagi partai yang didirikan dan dibesarkannya.

"Demokrat sudah berubah dari periode 2001-2005 dengan periode 2010. Dahulu, SBY adalah faktor tunggal. Pada 2010 sudah berubah menjadi seperti partai lain. Pemimpin akan berangkat dari bawah dan didukung dari daerah. Oleh karena itu, pendekatan ke depan tidak bisa *top down*, tetapi harus *bottom up*. Ketua baru adalah dia yang sering keliling ke daerah serta melakukan komunikasi dengan banyak pengurus daerah," ungkap Direktur Indobarometer M Qodari, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, antara lain, mantan Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmat dan wartawan

senior *Kompas* Budiarto Shambazy.

Qodari mengungkapkan, setidaknya ada tiga kubu terkait siapa calon ketua umum yang bisa muncul di dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Kubu-kubu tersebut tetap mengacu pada pemilihan ketua umum pada 2010, yaitu kubu Anas, kubu Marzuki Alie, dan kubu Cikeas. Persoalannya, calon yang akan diajukan dari kubu Anas dan Cikeas hingga kini belum jelas. Demikian pula apakah kubu Anas akan mengajukan calon atau tidak.

Kubu Cikeas bisa jadi akan mengajukan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) atau Pramono Edhie Wibowo. Namun, Pramono terganjal karena bukan kader dan masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, sementara situasi politik saat ini membutuhkan keputusan cepat.

"Ibas memang memenuhi syarat, dia kader dan pengurus. Namun, barangkali karena dia masih muda, ada yang belum mendukung. Intinya, SBY harus mengidentifikasi secara akurat-

lah, misalnya, apakah ketimbang Ibas lebih baik memilih para menterinya yang belakangan seolah-olah menjadi penyambung lidah SBY. Misalnya, Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, atau Amir Syamsuddin," ungkap Qodari.

Apabila diadakan KLB, Rahmat mengungkapkan, peta politik pemilihan menjadi sangat rawan bagi yang tidak menginginkan loyalis Anas menjadi pimpinan partai. Pasalnya, yang memiliki hak pilih adalah para pengurus DPD dan DPC. "Di kongres, dinamikanya sangat demokratis kalau berpedoman pada pemilihan 2010, saat peserta kongres tidak bisa diarahkan dan diatur. Masing-masing punya pikiran sendiri untuk kemajuan partai. Pada 2009, belum semua pengurus adalah loyalis Anas. Namun, pada 2012, terjadi penggantian DPD dan DPC," ungkapnya.

Budiarto Shambazy mengungkapkan, konflik di Partai Demokrat saat ini lebih karena persoalan siapa yang akan didaftarkan di daftar calon sementara yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada 15 April mendatang. (ANA)

## PARTAI DEMOKRAT

# Kepengurusan Membengkak

JAKARTA, KOMPAS — Kepengurusan Partai Demokrat semakin gemuk. Setelah ada ketua harian DPP dan ketua harian dewan pembina, pengurus partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono ini akan mengangkat dua wakil ketua umum.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Selasa (2/4), di Kompleks Parlemen, Senayan, menuturkan, kemungkinan pengangkatan dua wakil ketua umum ini dibicarakan dalam rapat pengurus harian DPP Partai Demokrat. Rapat tersebut digelar Senin malam dan dipimpin Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan.

Saat ini, Partai Demokrat telah memiliki dua wakil ketua umum, yaitu Max Sopacua dan Johiny Allen Marbun. Jika penambahan dilakukan, partai itu akan memiliki empat wakil ketua umum.

Saat ditanya apakah dua wakil ketua umum yang baru akan di-

ambil dari kubu Anas Urbaningrum atau Marzuki Alie, Nurhayati menjawab, "Faksi-faksi sudah tidak ada lagi."

Nurhayati yang disebut sebagai salah satu calon wakil ketua umum juga menjanjikan, tidak ada pengurusan dalam restrukturisasi yang akan dilakukan partainya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, yang dikenal sebagai teman dekat Anas, mengaku tak masalah dan akan menghormati jika kelompoknya tidak mendapat posisi di restrukturisasi Partai Demokrat.

Namun, menurut Saan, Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengatakan, tidak ada pembersihan dan pengurusan.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan tidak akan merekomendasikan seseorang untuk menjadi wakil ketua umum. Wakil ketua umum dapat dipilih dari

mana saja. Yang penting, sosok yang dipilih bisa membagi waktu dengan baik dan punya jiwa kepemimpinan.

Marzuki mengatakan, penambahan wakil ketua umum ini untuk meringankan kerja ketua harian. Kelak, Partai Demokrat akan membentuk koordinator wilayah sehingga yang penting adalah kepemimpinan untuk mendistribusikan tugas.

Bengkaknya kepengurusan Partai Demokrat ini terjadi sebagai kelanjutan dari kongres luar biasa (KLB) partai tersebut di Bali, Sabtu pekan lalu.

KLB ini berhasil memilih ketua umum baru Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pengganti Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas juga berada di Bali ketika KLB berlangsung. (NWO)

# SBY Tidak Mau Terganggu

Jero Wacik: Semua Aspirasi dalam KLB Akan Disatukan

SANUR, KOMPAS — Susilo Bambang Yudhoyono tak ingin pekerjaannya sebagai presiden terganggu oleh kesibukan lain. Karena itu, Demokrat akan memikirkan mekanisme yang memungkinkan ketua umum tidak perlu sampai setiap hari harus mengurus partai.

"Mekanisme itu bisa berupa memunculkan jabatan ketua harian atau mungkin menambah posisi wakil ketua umum," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jumat (29/3), di Sanur, Bali.

KLB Demokrat diselenggarakan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, 30-31 Maret 2013. Agenda utama adalah pengisian posisi Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat setelah ketum sebelumnya, Anas Urbatnigrum, menyatakan berhenti. Sejumlah pengurus daerah mengusulkan nama Yudhoyono,

yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, menjadi kandidat ketum.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Denny Kaili-mang, misalnya, menilai SBY sebagai figur yang paling pas mengisi posisi ketum karena Demokrat juga sedang memerlukan sosok pemersatu guna menghadapi Pemilihan Umum 2014. "Hanya SBY yang bisa menyatakan faksi-faksi," tutur Denny.

Tantangan besar menghadang ketum yang terpilih dalam KLB Partai Demokrat. Apa pun proses yang dipilih dalam KLB, pokok

persoalan mempertahankan kondisi partai ini bukan sekadar demi memilih ketum dan terpecahnya penanda tangan daftar calon anggota legislatif semantara Partai Demokrat.

Setelah mundurnya Anas, keberadaan kubu Cikeas (SBY) dan kubu Anas di tubuh Demokrat menguat. Ketika sebagian besar kader Demokrat mencalonkan SBY sebagai ketum, muncul nama Tri Dianto yang mencalonkan diri sebagai ketum. Tri adalah mantan Ketua DPC Demokrat Cilacap, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai loyalis Anas.

Dari pantauan Kompas sepan-

jang perjalanan dari Bandar Udara Ngurah Rai hingga lokasi KLB, ada tiga spanduk seruan kader Demokrat Tri Dianto bertuliskan "Tri Dianto for RIL Demokrat Butuh Ksatria, Bukan Para Seng-kuni". Mayoritas spanduk yang terpasang adalah ucapan hari raya Galungan dan Kuningan bergambar SBY dan Ani Yudhoyono serta Jero Wacik.

Jero menampik adanya kubu-kubu pendukung elite Demokrat. Semua aspirasi akan dikumpulkan untuk disatukan dalam sebuah target, dari memilih ketum hingga menyenangkan hati rakyat dengan bersatunya kem-

## OPSI PEMILIHAN KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT

### Opsi Aklamasi

Nama calon yang disebut:

**Susilo Bambang Yudhoyono**

### PRO-KONTRA

Untuk jangka pendek, posisi SBY dapat meredakan konflik internal, tetapi untuk jangka panjang justru mengedepankan kaderisasi partai.



### Opsi Musyawarah Mufakat

Nama calon yang disebut:

- **Ani Yudhoyono** (Ibu Negara)
- **Hadi Utomo** (mantan Ketua Umum)

### PRO-KONTRA

Dukungan kepada SBY menjadi modal besar agar pemilihan ketua umum berlangsung secara musyawarah untuk mufakat. Siapa pun yang ditunjuk SBY akan diterima kongres. Namun, nama yang muncul masih didominasi keluarga Cikeas.

### Opsi Kompetisi

Nama calon yang disebut diduga akan mengerucut pada:

- **Marzuki Ali** (Wakil Ketua Dewan Pembina/ketua DPR)
- **Saan Mustopa** (Wakil Sekjen)
- Calon yang didukung Cikeas

### PRO-KONTRA

Dinilai lebih demokratis, tetapi dikhawatirkan akan melahirkannya seperti halnya kongres 2010 di Bandung.

Sumber: Litbang "Kompas"/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas"

ANDRI

bali kader Demokrat. Menurut loyalis Anas yang juga mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, M Rahmad, kepada Kompas.com di Bali, Anas sependapat dengan para pengurus daerah, yakni mendukung SBY menjadi ketum. Anas juga berada di Bali untuk mengkonsolidasikan pendukungnya agar mengarahkan dukungan ke-pada SBY. (ATO/OSA/DIK/IAM)

Lihat Video Terkait "Persiapan Jelang KLB Demokrat" di [vod.kompas.com/jelangklibdemokrat](http://vod.kompas.com/jelangklibdemokrat)



# Kongres Bakal Diarahkan

## Gede Pasek Usulkan SBY Jadi Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS — Kongres Luar Biasa Partai Demokrat diperkirakan menghasilkan ketua umum yang selaras dengan aspirasi kelompok Cikeas di bawah kendali Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan memang bakal menyajikan tampilan yang demokratis, tetapi peserta bakal diarahkan memilih calon yang dekat Yudhoyono.

Demikian penilaian pengamat komunikasi politik dari Universitas Tarumanagara, Eko Harry Susanto, di Jakarta, Senin (18/3).

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dijadwalkan digelar akhir Maret ini di Bali untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa pencalonan ketua umum, antara lain anggota Dewan Pembina Marzuki Alie, anggota Dewan Pembina Syarifuddin Hasan, Wakil Sekjen Saan Mustopa, Ny Ani Yudhoyono, dan Kepala Staf TNI AD Pramono Edhie Wibowo.

Eko mengatakan, ada kubu-kubu dalam tubuh Demokrat,

seperti kelompok nasionalis yang dekat dengan Cikeas, kelompok Anas, atau yang agak di tengah yang diwakili sosok Marzuki. Namun, setelah Anas berhenti karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, posisi kelompok Cikeas di bawah kontrol Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin kuat. SBY akan berperan menentukan dalam KLB.

"SBY kembali masih menjadi poros utama yang menentukan KLB. Calon yang diinginkan dan dipercaya kubu Cikeas bakal terpilih menjadi ketua umum baru dalam kongres. Bisa jadi itu Ny Ani Yudhoyono, Syarifuddin Hasan, atau mungkin Kepala Staf

TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo," kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara itu.

Meski begitu, Marzuki yang kini jadi Ketua DPR tetap berpeluang menjadi ketua umum jika kongres mengizinkan pemimpin partai merangkap jabatan. Saan sangat kecil kemungkinan terpilih karena sulit mendapat restu SBY. Saan dianggap sebagai perwakilan kelompok Anas.

"KLB akan diarahkan agar nanti yang terpilih adalah orang SBY. Kalaupun terpilih ketua umum baru lewat proses demokrasi, proses itu sebenarnya hanya dramaturgi politik agar tampak demokratis saja," katanya.

### SBY diusulkan

Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengusulkan SBY menjadi Ketua Umum Demokrat. Pasalnya, hanya SBY yang bisa menyatukan semua faksi di internal partai dan menyelamatkan partai itu dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Saya yakin suara di DPD menginginkan (SBY jadi ketua umum). Ini karena di bawah sudah capek dengan konflik yang ada di elite," kata Gede Pasek.

Posisi SBY sebagai presiden, menurut Pasek, tidak menjadi persoalan karena ketika menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri juga menjadi Ketua Umum PDI-P.

Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Soepacua, tidak mungkin SBY menjadi ketua umum. "SBY di atas ketua umum karena dia Ketua Majelis Tinggi. Usulan SBY jadi ketua umum itu mengail di air keruh," ujar Max.

Dia juga mengatakan, semua orang, seperti Tri Dianto (mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah) dan Saan Mustopa bisa maju menjadi calon ketua umum. "Tentang saya, kita lihat saja nanti. Kami menginginkan ketua umum adalah kader yang sudah mengetahui budaya, kultur, serta sifat Partai Demokrat," ujarnya. (IAM/NWO)

# Calon Dipastikan Kader

## Surat Dukungan DPC Partai Demokrat Disampaikan kepada DPD

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat belum menentukan nama-nama calon ketua umum baru Partai Demokrat yang bakal dipilih pada kongres luar biasa di Bali, akhir bulan ini. Namun, dipastikan para calon itu merupakan kader Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, atau biasa disapa Ibas, mengemukakan hal itu dalam jumpa pers seusai rapat pengurus harian Partai Demokrat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/3). Mengenai nama-nama calon ketua umum yang berkembang di media massa, Partai Demokrat menghargainya sebagai aspirasi para kader Demokrat.

"Sudah banyak mendengar ucapan, banyak pernyataan, dan banyak ungkapan beberapa kader tentang nama-nama calon. Akan tetapi, Partai Demokrat belum secara resmi mengumumkan nama-nama calon ketua umum. Hanya Tuhan, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan peserta kongres luar biasa

(KLB)-lah yang mengetahui," kata Ibas.

Sesungguhnya, kata Ibas, Partai Demokrat tidak berharap KLB ini dilangsungkan. Namun, melihat situasi yang berkembang, KLB sangat diperlukan.

Pasca-pengunduran diri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, DPP mendapatkan amanah untuk menjalankan roda organisasi partai. Kemudian, melalui arahan Majelis Tinggi Partai Demokrat, diselenggarakan KLB pada 30-31 Maret 2013.

Ibas meyakini, KLB kali ini diselenggarakan secara sederhana, khidmat, teduh, dan menghasilkan kesepakatan bersama yang bisa diperoleh melalui cara musyawarah yang juga merupakan proses demokrasi. KLB ini ber-

tujuan melakukan konsolidasi kembali, memperkokoh soliditas kader di tingkat pusat hingga daerah untuk dapat menghadapi tantangan Pemilu 2014.

"Siapa pun yang terpilih dalam KLB adalah tokoh yang dapat diterima seluruh kader Partai Demokrat. Tentunya (orang ini) memiliki semangat juang untuk memajukan Partai Demokrat sebagai partai yang lebih baik. Dengan catatan, orang tersebut benar-benar kader Partai Demokrat," ungkap Ibas.

Max Sopacua juga menegaskan, syarat calon ketua umum ialah tercatat sebagai kader dan pengurus partai selama lima tahun. Calon juga tidak akan maju menjadi calon presiden 2014.

Mengenai permintaan Majelis Tinggi kepada pengurus cabang (DPC) dan daerah (DPD) untuk mengirim pernyataan tertulis dukungan kepada Majelis Tinggi, Max menilai sebagai wujud kepatuhan. "Dalam politik, hal itu sesuatu yang wajar," tuturnya.

Sejumlah ketua DPC, Kamis,

telah mengumpulkan surat pernyataan dukungan itu kepada pengurus DPD. Surat-surat itu akan diserahkan kepada Majelis Tinggi. Pada surat pernyataan itu tertera nama ketua DPC dan tanda tangannya di atas meterai Rp 6.000.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, yang namanya santer disebut sebagai salah satu calon, menolak berbicara mengenai persiapan KLB. "Saya tidak mau berkommentar. Mengalir saja. Kita tunggu saja," kata Marzuki, Kamis, di Istana Negara. Marzuki juga duduk sebagai anggota Majelis Tinggi dan Ketua DPR.

Marzuki adalah salah satu kandidat ketua umum dalam kongres 2010. Kongres itu dimenangi Anas, yang kemudian berhenti setelah menjadi tersangka kasus korupsi. Kandidat lain dalam kongres 2010 ialah Andi Alifian Mallarangeng, yang mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah juga dijadikan tersangka korupsi.

(OSA/ATO)

# Menteri Kian Leluasa

## Publik Perlu Menuntut Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS —

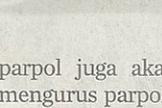
Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai akan semakin mendorong sejumlah menteri dari partai politik lebih leluasa mengurus kegiatan politik menjelang Pemilu 2014. Jika tidak bisa membagi konsentrasi, tugas-tugas negara dan kementerian untuk rakyat terancam terbengkalai.

Penilaian itu disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies, Philips J Vermonte, di Jakarta, Senin (1/4).

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa di Bali, pekan lalu, Yudhoyono menunjuk Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan UKM) sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat, EE Mangindaan (Menteri Perhubungan) sebagai Ketua Harian Dewan Pembina, dan Marzuki Alie (Ketua DPR) sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) tetap sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

Philips mengungkapkan, kepemimpinan baru tersebut menunjukkan Demokrat tidak bisa menemukan tokoh internal yang mengakar ke bawah. Demokrat tak melakukan pergantian dengan figur berkarakteristik politik serupa Anas Urbaningrum yang memiliki dukungan institusional di bawah. Secara eksternal, hal ini menandai kompetisi politik akan meningkat karena menteri-menteri lain asal

## RANGKAP JABATAN TOKOH PARPOL

|   | Partai Demokrat  | Jabatan Partai   | Jabatan Publik   |
|---|--|--|--|
|    | Susilo Bambang Yudhoyono<br>Syarifuddin Hasan<br>EE Mangindaan | Ketua Umum<br>Ketua Harian<br>Ketua Harian Dewan Pembina<br>Sekretaris Majelis Tinggi<br>Anggota Majelis Tinggi<br>Ketua DPP | Presiden<br>Menteri Koperasi dan UKM<br>Menteri Perhubungan  |
|    | Jero Wacik<br>Amir Syamsuddin<br>Roy Suryo                     |  | Menteri ESDM<br>Menteri Hukum dan HAM<br>Menteri Pemuda dan Olahraga                                     |
|    | Hatta Rajasa<br>Zulkifli Hasan<br>Azwar Abubakar               | Ketua Umum<br>Ketua DPP<br>Ketua DPW   | Menko Perekonomian<br>Menteri Kehutanan<br>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
|    | Agung Laksono<br>Sharif Cicip Sutardjo<br>MS Hidayat           | Wakil Ketua DPP<br>Wakil Ketua Umum<br>Kader Partai  | Menko Kesra<br>Menteri Kelautan dan Perikanan<br>Menteri Perindustrian                                   |
|    | Suswono<br>Tifatul Sembiring<br>Salim Segaf Al'Jufrie          | Kader Partai<br>Mantan Presiden Partai<br>Anggota Majelis Syuro  | Menteri Pertanian<br>Menteri Komunikasi dan Informatika<br>Menteri Sosial                                |
|   | Suryadharma Ali<br>Djan Faridz                                 | Ketua Umum<br>Unsur Pimpinan DPD<br>DKI Jakarta  | Menteri Agama<br>Menteri Perumahan Rakyat  |
|  | Muhaimin Iskandar<br>Helmy Faishal Zaini                       | Ketua Umum<br>Ketua DPP  | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal                           |

Sumber: Litbang "Kompas"/NDW/STN, diolah dari pemberitaan "Kompas"

ANDRI

parpol juga akan lebih leluasa mengurus parpol.

"Tentu agak sulit bagi SBY dan menteri-menteri lain untuk membagi tugas rangkap jabatan. Apalagi, terlalu banyak partai dalam koalisi gemuk yang dibangun SBY sejak 2009 sehingga menteri-menteri semakin cenderung mendahulukan kepentingan partainya yang sering kali berbeda visi dengan SBY atau Partai Demokrat," katanya.

Sebenarnya, dalam sistem demokrasi bisa saja sebagian menteri diambil dari parpol. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan apabila keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan benar-benar diformulasi oleh sedikit partai berkuasa. Dengan begitu, setiap kebijakan eksekutif adalah implementasi langsung dari arahan dan platform sedikit partai yang berkuasa dan memiliki visi yang sama.

“  
Semua menteri agar membuka kepada publik apa yang akan mereka laksanakan.

Philips J Vermonte

Karena itu, kata Philips, publik perlu menuntut pemerintah menjamin pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi nasib dan hajat hidup orang banyak. Semua menteri agar membuka kepada publik apa yang akan mereka laksanakan sehingga publik bisa menilai dan meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks pe-

milu, pertanggungjawaban itu dalam bentuk memilih atau tidak memilih partai yang berkuasa.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, juga menilai, banyaknya perangkapan jabatan oleh petinggi Demokrat akan menimbulkan implikasi di pemerintahan. Para menteri berada di dua kaki sehingga dalam praktiknya bakal memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika ketua harian yang masih menjabat menteri melakukan kunjungan ke daerah-daerah.

Dalam rangka pemilu, pengambilalihan Partai Demokrat oleh Yudhoyono belum tentu punya efek elektoral. Persepsi publik atas Demokrat bisa jadi belum berubah, bahkan bisa kontraproduktif karena Yudhoyono dipersiapkan menggabungkan tugas kepresidenan demi partai.

(IAM/DIK)

# Rangkap Jabatan Langgar Etika

## Adnan Buyung Nasution Akan Surati Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS — Kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merangkap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sesungguhnya telah melanggar etika politik.

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta berdiri di atas semua organisasi politik, sosial, dan ke-masyarakatan.

Demikian sikap Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN), sebagaimana disampaikan pendiri sekaligus Direktur Concern ABN, Adnan Buyung Nasution, di Jakarta, Rabu

Adnan mengatakan, hingga kini memang belum ada undang-undang yang secara tersurat melarang presiden merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Namun, hukum sebenarnya bukan hanya aturan tertulis, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral tidak tertulis yang justru melandasi aturan itu. Salah satunya, secara etika politik, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Presiden Yudhoyono telah melanggar etika politik dan memberikan contoh negarawan yang buruk. Ini merupakan ke-munduran bagi demokrasi Indonesia. Kami akan mengirimkan

surat peringatan kepada Presiden," katanya.

Mohamad Laica Marzuki mengatakan, presiden merupakan jabatan eksklusif puncak di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia. Hal ini merupakan amanat rakyat lewat pemilu langsung. Semestinya Yudhoyono menghargai jabatan ini dengan tidak merangkap sebagai ketua umum partai politik.

"Presiden merangkap jabatan ketua umum partai itu melanggar etika politik. Kalau tetap mau menjadi presiden, semestinya Yudhoyono melepaskan jabatan di partai. Kalau tidak, jabatan presiden jadi kehilangan makna," tuturnya.

Ray Rangkuti menyampaikan, perangkapan jabatan presiden sekaligus ketua umum partai merupakan pelanggaran etika demokrasi. Apalagi, Yudhoyono merangkap empat jabatan sekaligus, yaitu Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Hal ini menyalahi aturan partai politik yang berprinsip demokratis, partisipatif, dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Presiden Yudhoyono semestinya belajar kepada Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Amis Matta," kata Ray. (IAM)